



Laporan Kinerja

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT**

2025





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah dapat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2025-2029.

Penyajian Laporan Kinerja (LKj) ini disusun secara sistematis agar dapat memberi gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2025.

Selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik di tahun mendatang.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan reformasi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui upaya penataan organisasi, penyempurnaan proses ketatalaksanaan serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan secara konsisten.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat akan selalu mengupayakan perbaikan secara terus menerus (*continuous improvement*) untuk peningkatan kinerja yang bermanfaat bagi masyarakat melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara konsisten dan berkelanjutan.

Akhir kata, Laporan Kinerja (LKj) Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera Barat dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Padang, Januari 2025

Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat



Drs. LUHUR BUDIANDA SY, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197010061989081001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yaitu **“Sumatera Barat Madani Unggul dan Berkeadilan”** dengan melaksanakan **Misi 4** : Sumatera Barat Pusat perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Barat 2025-2029 di atas, maka di tetapkanlah tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah **Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif** dengan indikator **Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi**.

Adapun sasaran strategis pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, adalah:

1. Meningkatnya Realisasi Investasi;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur melalui 2 (dua)

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 1 (satu) Indikator Kinerja Pendukung yang dicapai dengan 6 program, 14 kegiatan dan 32 sub kegiatan.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama Tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah **107,92%**, yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Pencapaian IKU Sasaran Strategis Pada Perjanjian Kinerja
Tahun 2025

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Penanaman Modal PMA (ribu US\$)*) PMDN (juta Rp.) Total (juta Rp.)	121.540,00 8.949.824.000.000,00 10.700.000.000.000,00	128.526,97 17.004.363.366.136,00 19.060.794.811.929,00	105,75% 170,90% 178,14%
Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis 1					178,14%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,48	98	101,58%
Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis 2					101,58%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	80,69 / A	81,52 / A	101,03%
Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis 3					101,03%
Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis 1 s.d 3					128,92%

Sumber : Laporan Kinerja (LKj) DPMPITSP Tahun 2025

*) Kurs US\$ = Rp. 16.000,00

Indikator *outcome* yang ditargetkan pada Tahun 2025 adalah indikator Kinerja Utama (IKU), berupa indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Capaian IKU Tahun 2025 selanjutnya digunakan untuk menilai capaian Sasaran Strategis Tahun 2025. Pencapaian Sasaran Strategis pada Tahun 2025 yang didukung capaian IKU (*outcome*) adalah sebagaimana digambarkan dalam tabel di atas dengan uraian sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal” tahun 2025 sebesar 178,14% diukur melalui capaian 1 (satu) IKU.
2. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu” tahun 2025 sebesar 101,58% diukur melalui capaian 1 (satu) IKU.
3. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” Tahun 2025 sebesar 101,03% diukur melalui capaian 1 (satu) IKP.

Seluruh rencana capaian kinerja Tahun 2025 dapat dicapai dan berhasil diwujudkan, walaupun ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya tidak terealisasi 100% disebabkan oleh beberapa faktor penghambat dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya. Melalui langkah-langkah koordinatif dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dapat diminimalisir seluruh kendala dan hambatan sehingga mendapatkan solusi pemecahannya, hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi sebagai salah satu tuntutan masyarakat, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Atas dasar tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di bidang Urusan Penanaman Modal dan menjalankan tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di urusan Penanaman Modal.

Dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan laporan tahun pertama RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.2. GAMBARAN ORGANISASI

1.2.1. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*), setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan perubahan terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan sesuai Pasal 2 serta Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.2.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan, penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di Lingkungan Dinas;
- b. Pelaksanaan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Pelaksanaan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

- d. Pelaksanaan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Dinas;
- e. Pelaksanaan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. Pelaksanaan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan bahan evaluasi dan pelaporan di Lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

1.2.3. STRUKTUR ORGANISASI

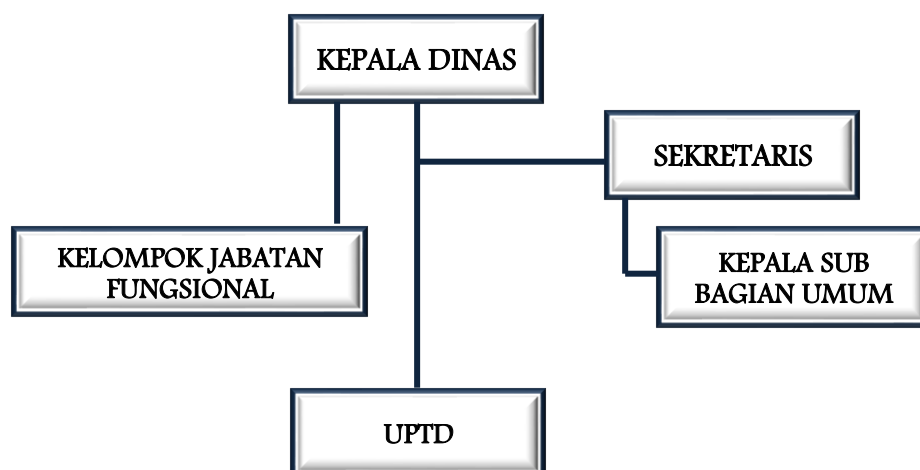
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah Membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal. Secara kelembagaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di urusan Penanaman Modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berdasarkan eselonering berada pada tingkat Eselon II Provinsi. Unsur

pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, meliputi:

1. Kepala Dinas dijabat oleh Drs. Luhur Budianda SY, M.Si
2. Sekretaris dijabat oleh Yudhi Ichsan Arianto, ST.yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dijabat oleh Hendri Gusman Darma
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. UPTD;

Secara lengkap struktur dan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1.
Struktur dan Organisasi
DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat



Sumber: : Peraturan Gubernur Sumatera Barat 29 Tahun 2023

1.2.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi yang berjumlah 47 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 27 orang (57,45%) laki-laki dan 20 orang (42,55%) perempuan.

Dari data tersebut jumlah perempuan dengan laki-laki sebanding sehingga tidak memiliki pengaruh secara terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

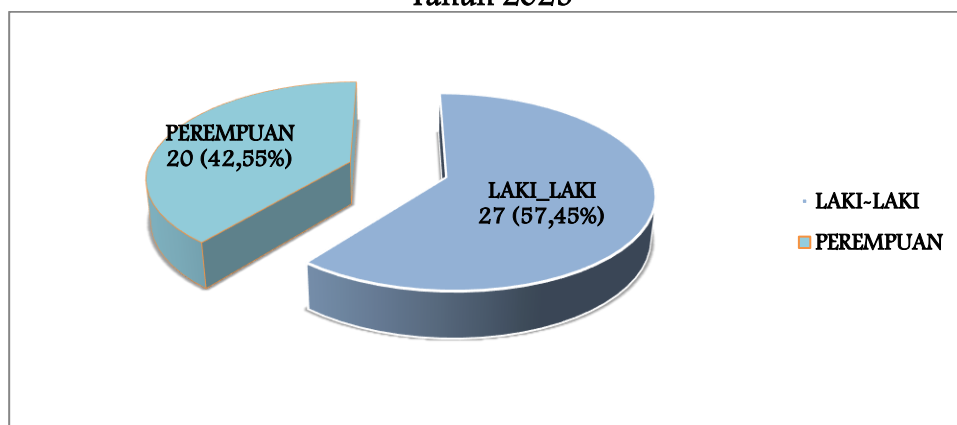
Tabel 1.1.
Daftar Golongan Pegawai DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1.	Golongan I	~	~	0	0%
2.	Golongan II	1	1	2	4,25%
3.	Golongan III	16	14	30	63,83%
4.	Golongan IV	10	5	15	31,92%
	JUMLAH	27	20	47	100,00%

Sumber : Subbag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2025

Dari data tersebut jumlah perempuan dengan laki-laki sebanding sehingga tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025



Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2025

Berikut adalah komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2.
Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025

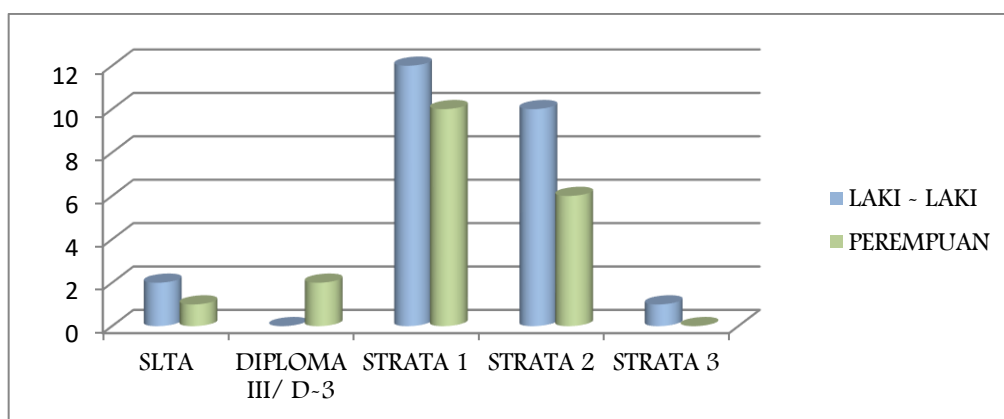
N O	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1.	SLTP	~	~	~	0%
2.	SLTA	2	1	3	6,38%
3.	DIPLOMA III/ D-3	~	2	2	4,26%
4.	STRATA 1	13	11	24	51,06%
5.	STRATA 2	11	6	17	36,17%
6.	STRATA 3	1	~	1	2,13%
JUMLAH		27	20	47	100,00%

Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2025

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sangat memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat karena lebih dari 93,62% pegawai sudah berpendidikan sarjana, diantaranya 38,30% pegawai

sudah berpendidikan pasca sarjana. Khusus untuk bidang pelayanan perizinan perlu adanya penambahan pegawai yang berlatar belakang teknis terkait layanan perizinan disamping melalui diklat teknis, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dibawah ini:

Grafik 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025



Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2025

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3.
Daftar Golongan Pegawai DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1.	Golongan I	~	~	0	0%
2.	Golongan II	1	1	2	4,25%
3.	Golongan III	16	14	30	63,83%
4.	Golongan IV	10	5	15	31,92%
	JUMLAH	27	20	47	100,00%

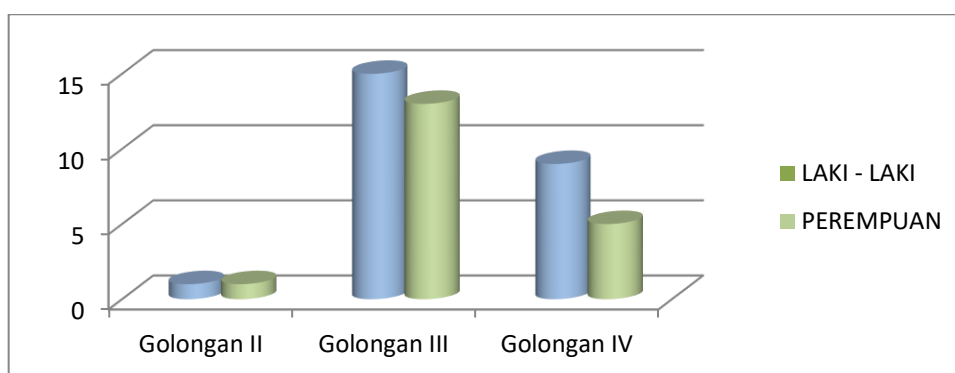
Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2025

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 95,45% pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Sumatera Barat adalah golongan III dan IV, merupakan pegawai yang berpendidikan Strata 2 dan Strata 1 dan Sarjana Muda. Pegawai yang berpendidikan Strata I pada umumnya sudah menduduki pangkat puncak pada jenjang kepegangannya dan telah memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun.

Berikut jumlah PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per golongan:

Grafik 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025



Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2025

Komposisi Jabatan Fungsional yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4.
Daftar Pejabat Fungsional DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025

NO	JABATAN FUNSIONAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Perencana Ahli Pertama	1	~	1
2.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	1	~	1
3.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	1	2	3
4.	Penata Perizinan Ahli Madya	2	1	3

5.	Penata Perizinan Ahli Muda	4	~	4
6.	Penata Perizinan Ahli Pertama	1	2	3
7.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	1	1	2
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	3	1	4
	JUMLAH	14	7	21

Sumber : Subbag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2025

1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan urusan pembangunan bidang penanaman modal, dalam rangka menjamin terciptanya investasi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai dinas yang mengkaji berbagai kebijakan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, untuk kemudian dirumuskan dalam suatu kebijakan pembangunan.

Investasi berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia umumnya dan terkhusus untuk Sumatera Barat. Pada tahun 2025, Badan Pusat Statistik mencatat angka pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan ketiga tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 4,33 persen dibanding tahun 2023 dan berada pada peringkat ketujuh di Sumatera. Sumatera Barat menyumbang 6,72 persen terhadap perekonomian di Pulau Sumatera dan sebesar 1,50 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (sumber : Padang *IDN Times* tgl. 06 Nov 24 | 07:19)

Sejalan dengan sasaran kepala daerah yang didukung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat **Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif** yang menjadi Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan indikator kinerja **Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi** sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Meningkatnya pertumbuhan investasi di daerah sebagai ujung tombak penggerak roda perekonomian yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. yang mampu untuk meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan daya saing untuk menarik investasi dari dalam maupun luar negeri. Untuk merealisasikan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya pertumbuhan investasi menjadi salah satu sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD tahun 2025-2029

Pencapaian sasaran ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari segi kebijakan pemerintah pusat atau pun daerah, sumber daya ekonomi, potensi sumber daya alam yang banyak, ketersediaan tenaga kerja serta dukungan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik, sehingga dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Indikator yang telah ditetapkan untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut diukur berdasarkan data Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN yang berdasarkan release yang dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM RI dan diolah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, di mana Akumulasi Nilai Realisasi Investasi ini berasal dari Akumulasi realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang sudah dikonversikan ke nilai rupiah.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029, persentase peningkatan investasi di Provinsi ditargetkan sebesar 10,5 % selama tahun 2025. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024, target tahun 2025 ditetapkan lebih tinggi 1,0%.

1.4. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagai dinas pelaksana urusan penanaman modal perlu

melakukan akselerasi dan menyusun strategi terkait dengan kinerja aparaturnya, kedisiplinan serta ketaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga dapat menjawab tuntutan visi dan misi pembangunan daerah secara nyata dan profesional.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain :

1. Belum tuntasnya Kebijakan Strategis yang mendorong calon investor untuk berinvestasi di Sumatera Barat terkait dengan prose penetapan regulasi terkait dengan kemudahan berusaha;
2. Perubahan sistem pelaporan dari OSS versi 1.1 ke OSS – RBA mengharuskan perusahaan untuk migrasi data terlebih dahulu;
3. Banyaknya perusahaan yang belum melaporkan LKPM karena ketidak tahuan perusahaan tersebut terhadap kewajiban dalam penyampaian LKPM dan karena keterbatasan SDM perusahaan yang memahami tatacara pelaporan LKPM;
4. Faktor kondisi alam, kondisi sosial dan kelembagaan wilayah potensi dan peluang investasi yang belum mendukung lokasi tersebut untuk kegiatan penanaman modal ke depannya serta aksesibilitas yang sulit dijangkau.
5. Masih ada perusahaan yang belum mau melaporkan kegiatan penanaman modal, dari 200 perusahaan yang menjadi kewenangan provinsi yang belum melaporkan kegiatan penanaman modanya sebanyak 143 perusahaan yang belum melaporkan LKPMnya.
6. Banyaknya pelaku usaha yang belum mengerti tentang operasional OSS-RBA dan LKPM.
7. Keterlambatan pemenuhan izin oleh pelaku usaha akibat sistem yang baru melalui OPD Teknis seperti RTRW, RDTR, IzinL lingkungan,PKKPR, SIMBG, dan syarat teknis lainnya.
8. Belum Clear and Cleannya tanah lokasi untuk berinvestasi., disebabkan tanah di Sumatera Barat pada umumnya tanah ulayat;
9. Adanya permasalahan Tata Ruang atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehingga banyak pelaku usaha/Perusahaan PMA/PMDN tidak

jadi melanjutkan rencana investasinya dikarenakan tidak ada kesesuaian tata ruang untuk investasi.

10. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Khususnya Nelayan tentang Pengisian Format Responden serta Berubahnya Sistem dari Manual ke Online;
11. Masih terdapat gangguan atau kendala jaringan atau pengembangan aplikasi perizinan OSS oleh Pemerintah Pusat;
12. Masih rendahnya kemampuan aparatur penyelenggara terhadap penggunaan Teknologi Informasi (Layanan secara elektronik);
13. Terbatasnya jumlah aparatur penyelenggara perizinan;
14. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan;
15. Keterbatasan pelaku usaha atas perizinan secara online melalui OSS dan aplikasi perizinan berbasis web dan mengubah pola pikir masyarakat atas layanan secara tatap muka;
16. Sistem Perizinan Online Single Submission (OSS) masih belum sempurna dalam pengembangan sehingga terdapat kendala dalam pelaksanaan perizinan di daerah.

BAB II PERENCANAAN KERJA

Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat disusun secara berjenjang dengan memperhatikan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah yang berpedoman pada dokumen RPJMD serta memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran yang disahkan. Dari dokumen RPJMD tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menyusun rencana strategis yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan, indikator kinerja sasaran, target, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan pembangunan, yang kemudian digunakan menjadi dasar penyusunan ikhtisar perjanjian kinerja.

Sehubungan dengan perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana terdapat perbedaan target kinerja antara Laporan Kinerja dengan target kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan (Renstra OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Terjadinya perbedaan ini dikarenakan adanya penyesuaian target kinerja pada perjanjian kinerja dengan melihat dan memperhatikan kondisi investasi sepanjang tahun 2025. Oleh karena itu target investasi tahun 2025 disesuaikan kembali dengan Hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025, yaitu diangka Rp. 10.700.000.000.000,-

2.1. TUJUAN DAN SASARAN

Melalui sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menetapkan 1 (satu)

tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Investasi, dengan indikator tujuan yaitu Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi. Berdasarkan tujuan ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya-upaya lanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan investasi.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun sasaran yang dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Realisasi Investasi, dengan indikator kinerja sasaran Nilai Realisasi Penanaman Modal;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan indikator kinerja sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Uraian di atas, dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selama periode Renstra 2025-2029 dalam tabel sebagai 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025-2029

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	-	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	%	10,50%	11,50%	11,75%	12,00%	12,25%	12,50%
		Meningkatnya Realisasi investasi	Nilai Realisasi Penanaman Modal PMA (ribu US \$) PMDN (juta Rp.) Total	Ribu US \$ Rp. juta juta Rp.	121.540,00 8.949.824.000.000 10.700.000.000.000	135.517,10 9.979.053.760.000 11.930.500.000.000	151.440,36 11.151.592.566.000 13.332.333.750.000	169.613,20 12.489.783.720.000 14.932.213.800.000	190.390,82 14.019.782.182.500 16.761.409.990.500	214189,67 15.772.254.991.300 18.856.586.239.300
		Meningkatnya Kualitas pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai /	97,63	97,70	97,75	97,80	97,90	98,00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai / Kategori	80,69 / A	80,82 / A	80,90 / A	81,00 / A	81,15 / A	81,25 / A

Sumber : Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029

2.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut, diuraikan dalam tabel 2.2. sebagai berikut :

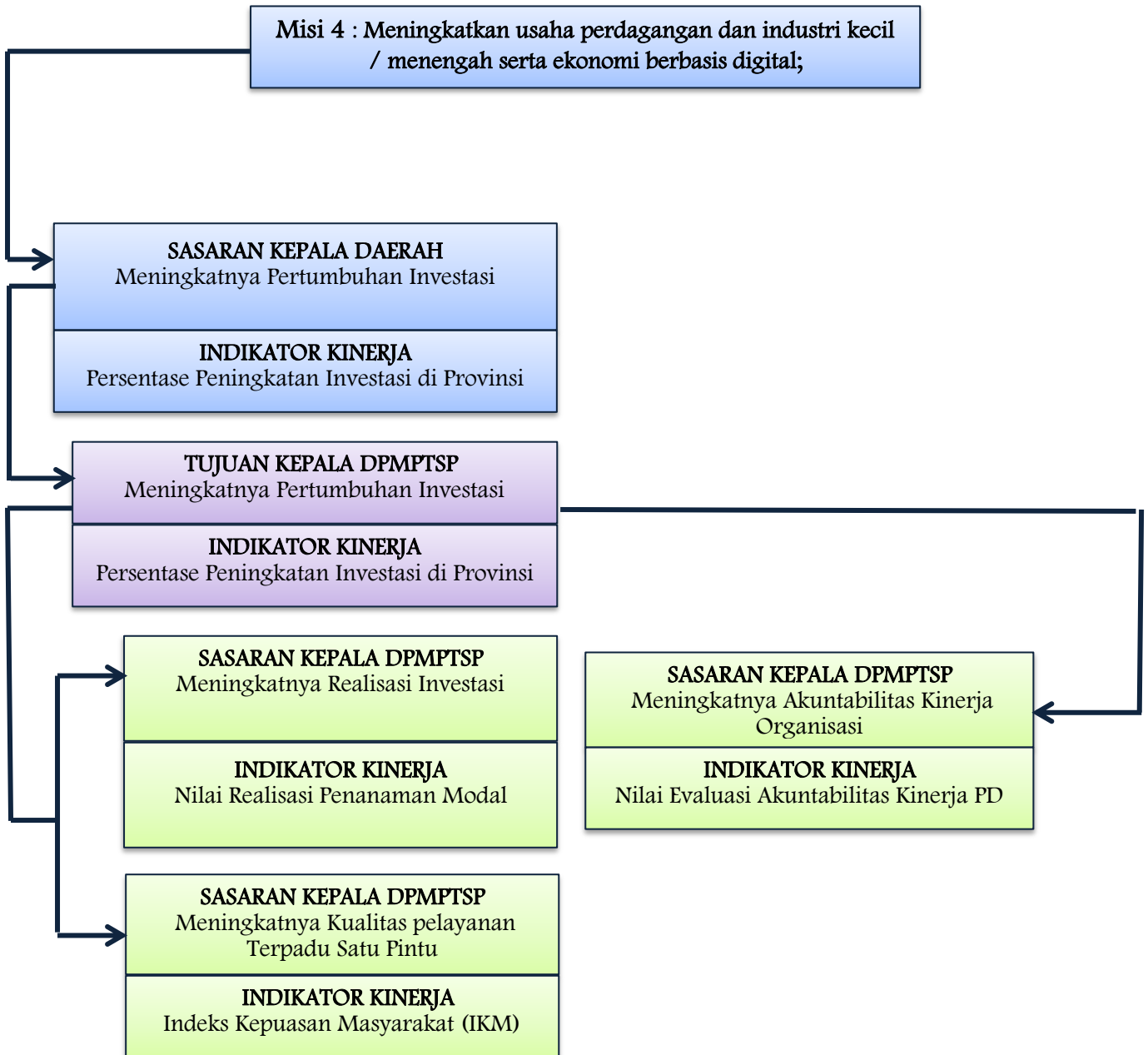
Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025 – 2029

Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3	Arah Kebijakan 4	
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	1. Meningkatnya Realisasi Investasi	Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat	1. Peningkatan Data Potensi dan Peluang Investasi 2. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 3. Peningkatan Upaya Promosi Investasi	
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peningkatan Layanan Investasi dan Penanaman Modal	1. Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Investasi serta Pengembangan Layanan Investasi Berbasis Teknologi Informasi 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 3. Pengembangan Layanan Investasi Yang memberikan Kemudahan, Kepastian, dan Transparansi Proses Perizinan bagi Investor dan Pengusaha 4. Pembentukan Produk Hukum Daerah / Regulasi Daerah untuk Kemudahan Perizinan dan Kemudahan Berinvestasi	
	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi		Meningkatkan kualitas perencanaan organisasi	Peningkatan SDM Organisasi
			Meningkatkan kualitas pelaporan organisasi	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan organisasi
			Meningkatkan pengawasan internal organisasi	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pengawasan internal organisasi

Sumber : Rencana Strategis DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, secara ringkas dapat dilihat melalui gambar 2.1. berikut :

Gambar 2.1
Keterkaitan Misi Kepala Daerah dengan Tujuan, Sasaran
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD



Sumber : Rencana Strategis DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur.

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 02 Desember 2025. Terjadinya perubahan perjanjian kinerja ini dikarenakan adanya penyesuaian atas target realisasi investasi PMA ke target realisasi investasi PMDN, dikarenakan (1) Minimnya investor lokal yang menjadi pendamping investor asing, sehingga berpengaruh kepada minat investor PMA ke Sumatera Barat; (2) Realisasi investasi PMA dan PMDN sampai dengan kondisi triwulan 3 yang masih di bawah target; (3) Potensi investasi di Sumatera Barat masih banyak di usaha Mikro dan Kecil; dan perubahan perjanjian kinerja ini tidak merubah target tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi sebesar 10,5% di RPJMD dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Sumatera Barat.

Target kinerja pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 menyesuaikan dengan realisasi kinerja tahun 2024, sehingga tidak akan mempengaruhi capaian target tujuan OPD yakni Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi dan kemudian kinerja inilah yang selanjutnya dijabarkan (*cascading*) menjadi kinerja seluruh unit kerja dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan ditandatangani tersebut tergambar pada tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025

NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Penanaman Modal PMA (ribu US \$) *) PMDN (Rp.) Total (Rp.)	121.540,00 8.949.824.000.000 10.700.000.000.000
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,63
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80,69 / A

*) 1 US \$ = Rp. 14.400,-

**) Angko total target investasi PMA dan PMDN sudah merupakan akumulasi dari angka PMDN dan PMA yang sudah dikonversikan ke nilai Rupiah

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ANGGARAN APBD		APBD
1.1.	<i>Program</i> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 11.659.29.345	APBD
1.2.	<i>Program</i> Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 44.327.600	APBD
1.3.	<i>Program</i> Promosi Penanaman Modal	Rp. 89.729.450	APBD
1.4.	<i>Program</i> Pelayanan Penanaman Modal	Rp.287.978.356	APBD
1.5.	<i>Program</i> Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.174.572.000	APBD
1.6.	<i>Program</i> Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp.9.574.500	APBD
	TOTAL ANGGARAN	Rp.12.265.211.251	APBD

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

2.4. STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025.

Untuk mencapai tujuan, sasaran yang sudah ditargetkan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat maupun program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung tahun 2025, sebagaimana tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4.
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
terkait Langsung Pencapaian Sasaran
Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		12.265.211.251
URUSAN PENANAMAN MODAL		
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.659.029.345
I.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.715.000
I.1.1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1.525.000
I.1.2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.660.000
I.1.3.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	11.530.000
I.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.307.941.033
I.2.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.141.515.133
I.2.2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	164.595.900
I.2.3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD	1.830.000
I.3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.670.000
I.3.1.	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6.670.000
I.4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.446.000
I.4.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	0
I.4.2.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.446.000
I.5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.610.932.061
I.5.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	18.002.400
I.5.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.730.000

I.5.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.775.000
I.5.4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.004.000
I.5.5.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	1.995.000
I.5.6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.389.425.661
I.5.7.	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0
I.6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.030.000
I.6.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0
I.6.2.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	14.030.000
I.7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.337.731.751
I.7.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.520.000
I.7.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.170.211.751
I.8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.563.500
I.8.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190.710.000
I.8.2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	3.125.000
I.8.3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.560.000
I.8.4.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	126.168.500
II.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	44.327.600
II.1.	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	0
II.1.1.	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Berusaha Penanaman Modal	0
II.2.	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	44.327.600
II.2.1.	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	0
II.2.2.	Sub Kegiatan Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada PIR (Potensi Investasi Regional)	18.751.001
II.2.3.	Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	25.576.599
II.2.4.	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	0
III.	Program Promosi Penanaman Modal	89.729.450
III.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	89.729.450
III.1.1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	74.229.300
III.1.2.	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	15.500.150
IV.	Program Pelayanan Penanaman Modal	287.978.356
IV.1.	Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang – Undang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	387.978.356
IV.1.1.	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	16.619.206

IV.1.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	201.756.000
IV.1.3.	Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	69.603.150
V.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	174.572.000
V.1.	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	174.572.000
V.1.1.	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	41.808.300
V.1.2.	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	46.571.450
V.1.3.	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	86.192.250
VI.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	9.574.500
VI.1.	Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	9.574.500
VI.1.1.	Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	9.574.500
TOTAL PAGU ANGGARAN		12.265.211.251

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah bertujuan untuk membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur serta mampu mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat kerjanya bagi masyarakat termasuk atas penggunaan anggaran yang dikelolanya.

Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dibangun dengan komitmen mengimplementasikan ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya penyempurnaan dari ISO 9001:2015 dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kehutanan yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik yang dilakukan melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dilakukan melalui pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yaitu pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini

mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumusan kriteria sebagai berikut :

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk :

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah;
2. Menganalisis penyebab/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan, dan;
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun mendatang.

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagaimana tampak pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	2	3	4
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2.	76% ≤ 90%	Tinggi	
3.	66% ≤ 75%	Sedang	
4.	51% ≤ 65%	Rendah	
5.	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat pada Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merupakan kinerja tahun ke-1 Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

Berkenaan dengan pencapaian sasaran tersebut diatas, pengukuran kinerja dilakukan dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk persentase, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, dan membandingkan realisasi kinerja dengan standar serta membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja kementerian dan provinsi lain yang berdekatan. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam Tabel 3.1 akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, secara ringkas ditunjukkan oleh Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Penanaman Modal PMA (ribu US \$)* PMDN (Rp.) Total (Rp.) **)*****)	121.540,00 9.949.824.000.000,00 10.700.000.000.000,00	128.525,34 17.004.387.202.261,00 19.060.792.622.673,00	105,75% 170,90% 178,14%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,48	99	101,40% /
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	80,69 / A	81,52 / A	101,03%/ 100 %
Rata – Rata Capaian Indikator Kinerja					126,86%
<p>*) Target 1 US \$ = Rp. 14.400,- dan Realisasi 1 US \$ = Rp.16.000,- **) Realisasi Investasi PMDN dan PMA adalah Akumulasi dari realisasi investasi PMDN dan PMA yang sudah dikonversi kedalam nilai rupiah ***) Realisasi s.d Triwulan III Tahun 2025, belum termasuk realisasi UMK Semester II..</p>					

Sumber : Hasil Olahan DPM & PTSP Tahun 2025

Dari capaian kinerja atas 3 (tiga) indikator kinerja diatas dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Nilai Realisasi Penanaman Modal

Pengukuran kinerja dari indikator kinerja Nilai Realisasi Penanaman Modal merupakan cerminan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal, artinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berkomitmen penuh untuk meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha di provinsi Sumatera Barat.

2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Hasil evaluasi atas tingkat kepuasan terhadap pelayanan UPP yang didapat melalui hasil pada survei dan e-survei kepuasan yang ada di

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Survei dan e-survei ini diisi oleh setiap tamu yang datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat terkait dengan layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok serta fungsinya pada urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

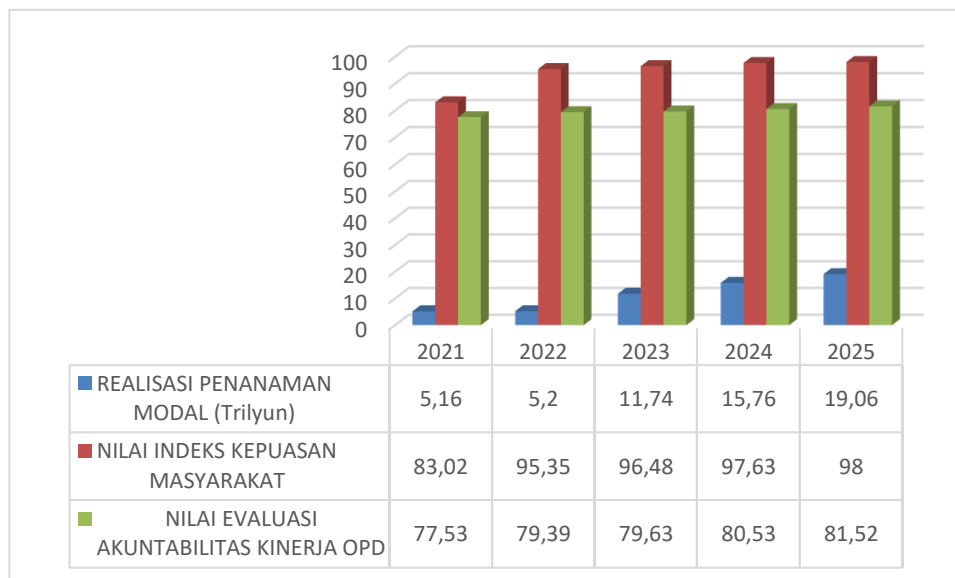
Hasil evaluasi nilai akuntabilitas kinerja (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun pencapaian atas pengukuran kinerja Organisasi masih perlu lebih ditingkatkan lagi, dikarenakan penilaian dari 4 (empat) komponen yang dinilai, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi internal nilainya masih belum maksimal jika dibandingkan dengan pembobotannya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa dari 3 (tiga) realisasi kinerja sasaran strategis dengan masing – masing indikator kinerjanya sampai dengan triwulan III secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 94,40% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti bahwa upaya-upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan pertumbuhan investasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 telah dilakukan dengan sangat baik.

Perbandingan hasil pengukuran realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan 2025 sesuai dengan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, seperti tampak dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 3.1
Perbandingan Hasil Pengukuran
Realisasi Kinerja Sasaran
Tahun 2021 s.d 2025



Sumber Data : Diolah dari data kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat.

3.3. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mempedomani hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebagaimana disajikan diatas, pada sub bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran strategis. Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja (*outcome*) sasaran dengan melihat secara lebih rinci pada capaian target indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dengan dukungan data atau informasi hasil sasaran secara menyeluruh.

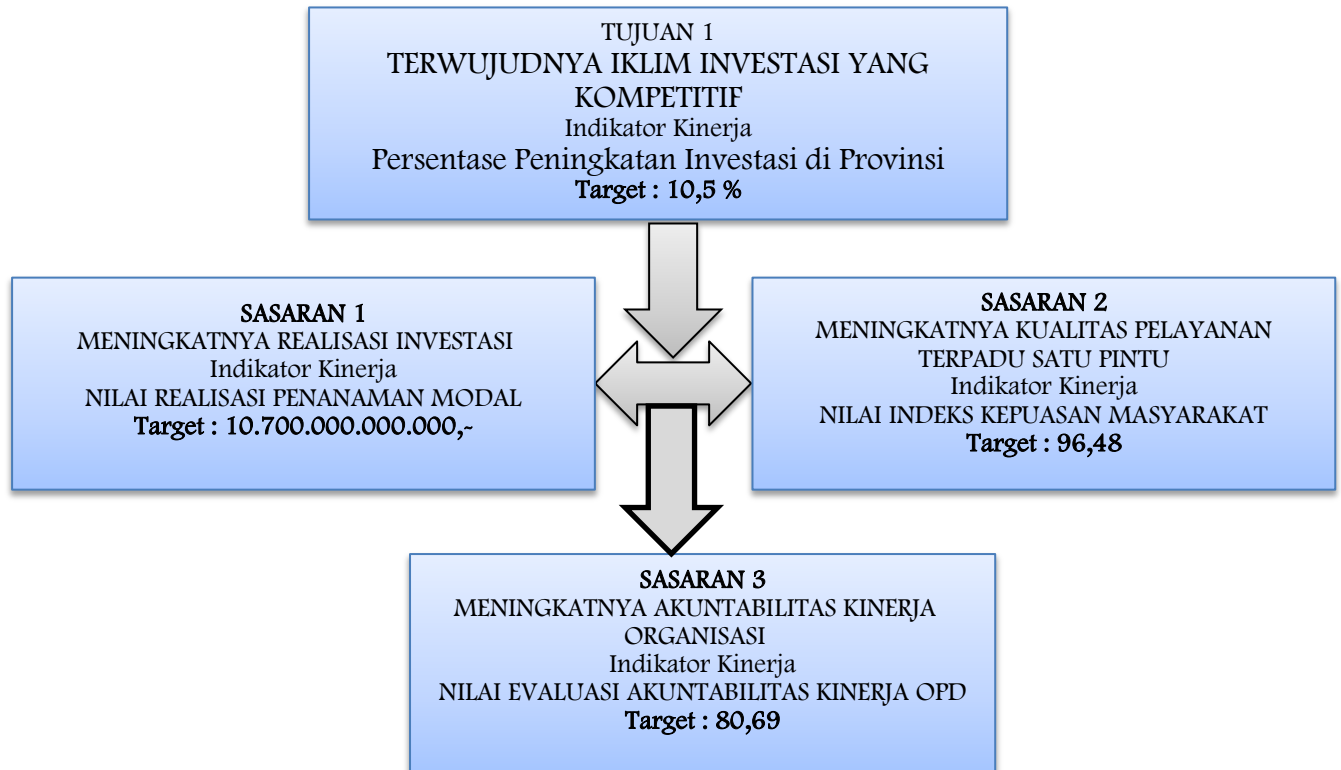
Capaian sasaran strategis diperoleh dari rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat disajikan sebagai berikut.

TUJUAN 1 MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INVESTASI

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, telah dirumuskan visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan yang didukung melalui 8 misi. Pada Misi ke 4 yaitu **Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat** yang memiliki tujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing, Kepala Daerah merumuskan 6 sasaran kinerja yang salah satunya yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Investasi yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi.

Berdasarkan hal inilah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator kerjanya dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 dengan 1 tujuan dan 3 sasaran. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas, dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:

Gambar 3.1
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Penetapan target kinerja indikator tujuan Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi sesuai dengan dokumen RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2025 – 2029.

Pada tujuan **Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif** dengan target pada tahun 2025 sebesar 10,50% terealisasi sebesar 20,94%. Sumber data indikator kinerja tujuan Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi didapat melalui release Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI dan membandingkannya dengan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja
Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Investasi dengan
Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi
Tahun 2025

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	10,5%	20,94% *)	199,43%

Sumber :Hasil Olahan DPM & PTSP Tahun 2025

*) Perhitungan realisasi belum termasuk realisasi investasi UMK Semester II.

Formulasi terkait dengan capaian indikator kinerja tujuan pertama yakni Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi diperoleh dari Nilai Realisasi Penanaman Modal tahun n dikurangi dengan Nilai Realisasi Penanaman Modal tahun n – 1, kemudian dibagi dengan Nilai Realisasi Penanaman Modal tahun n – 1, seperti di bawah ini:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi} \\
 & = \frac{\text{Nilai Realisasi Penanaman Modal Tahun } n - \text{Nilai Realisasi Penanaman Modal Tahun } n-1}{\text{Nilai Realisasi Penanaman Modal Tahun } n-1} \times 100\% \\
 & = \frac{\text{Rp.19.060.794.811.741} - \text{Rp.15.760.564.694.480,-}}{\text{Rp.15.760.564.694.480,-}} \times 100\% \\
 & = \frac{\text{Rp. 3.300.230.117.261,-}}{\text{Rp. 15.760.564.694.480,-}} \times 100\% \\
 & = 20,94\%
 \end{aligned}$$

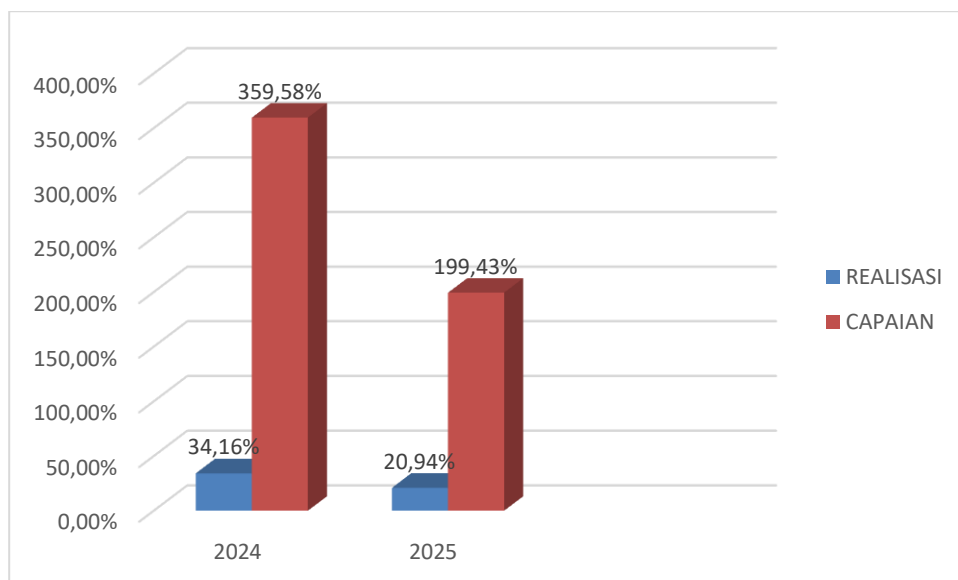
Sumber : Olahan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025

Dari tabel 3.3 diatas, dapat dilihat bahwa target indikator kinerja tujuan Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi tahun 2025 dari yang ditargetkan dalam RPJMD dan Renstra OPD sebesar 10,5% dapat

direalisasikan sebesar **20,94%** dengan tingkat capaian kinerja sebesar **199,43%** termasuk kategori keberhasilan **Sangat Tinggi**.

Perbandingan realisasi tujuan dengan tahun sebelumnya. Realisasi kinerja tujuan pertama dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi tahun 2025 yang terealisasi sebesar **20,94%** mengalami penurunan sebesar **13,22%** dibandingkan dengan realisasi kinerja 2024, dimana realisasi kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi tahun 2024 sebesar **34,16%**. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024-2025 dapat dilihat grafik 3.2 berikut :

Grafik 3.2
Perbandingan Realisasi dan Capaian
Tahun 2024 -2025



Sumber : Olahan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025

Sedangkan Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Kinerja
RPJMD/Renstra OPD 2021 - 2026
Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi
Tahun 2021 – 2025

NO	TAHUN	TAHUN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
1.	2021	6,00 %	5,02 %	83,67 %
2.	2022	6,00 %	0,79 %	13,17 %
3.	2023	8,00 %	20,61%	257,63 %
4.	2024	9,50 %	34,16%	359,58 %
5.	2025	10,5 %	20,94%	199,43 %

Sumber : DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat

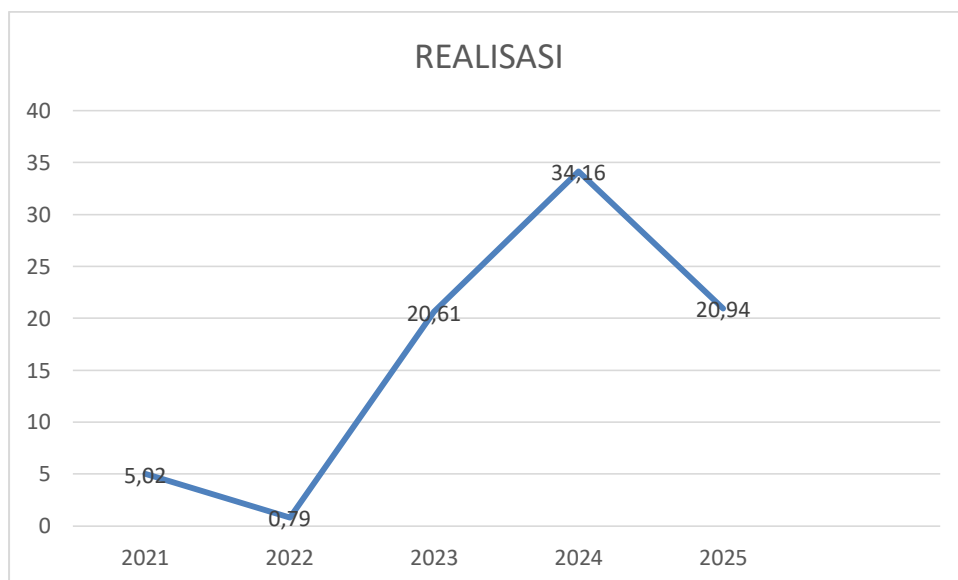
Perbandingan Realisasi dengan Dokumen Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, Sasaran Kepala Daerah Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi langsung menjadi tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Untuk Tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sebagaimana tergambar pada tabel 3.4 dan terlihat dalam grafik 3.2 berikut ini :

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Kinerja Tujuan
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Tahun 2025
dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD / RENSTRA	CAPAIAN s.d Tahun 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD / RENSTRA (%)
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	10,50%	20,94%	199,43	12,50%	
Rata – Rata Capaian Kinerja						

Sumber : Olahan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Grafik 3.3
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Kinerja
RPJMD dan Renstra OPD 2021 - 2026
Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi
Tahun 2021 – 2025



Sumber : DPMPSTP Provinsi Sumatera Barat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah berupaya maksimal mencapai target kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Hal ini terlihat dari progres realisasi setiap tahunnya, dimana realisasi Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi pada tahun 2021 sebesar 5,02% dan signifikan bertumbuh hingga tahun 2025 yaitu(menunggu realisasi investasi UMK Semester II). Capaian ini tidak terlepas dari setiap upaya perbaikan yang dilakukan terhadap kinerja dalam rangka mencapai target kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi.

Dalam rangka mencapai tujuan “**Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif**”, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis, yakni “

1. **Meningkatnya Realisasi Investasi** dengan indikator kinerja Nilai Realisasi Penanaman Modal;
2. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu** dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
3. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja organisasi** dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian dari kedua sasaran strategis tersebut, adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Realisasi Investasi
----------------------------	---

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025. Capaian kinerja sasaran strategis “**Meningkatnya Realisasi Investasi**” dilihat berdasarkan realisasi penanaman Modal (PMA dan PMDN) dan capaian kinerja indikator kinerja tersebut tergambar dalam tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1.1
Meningkatnya Realisasi Investasi
Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Penanaman Modal			
	PMA (ribu US \$)	121.540,00	128.525,34	105,75%
	PMDN (juta Rp)	9.949.824.000.000,00	17.004.387.202.261,00	170,90%
	Total (Rp.)** ***)	10.700.000.000.000,00	19.060.792.622.673,00	178,14%
Rata – Rata Kinerja Sasaran Startegis 1				178,14 %
<ul style="list-style-type: none"> •) 1 US \$ = Rp. 16.000,- **) Angka total target dan realisasi investasi PMA dan PMDN sudah merupakan akumulasi dari angka PMDN dan PMA yang sudah dikonversikan ke nilai Rupiah ***) Total Nilai Realisasi Penanaman Modal belum termasuk realisasi UMK Semester II 				

Sumber : DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat

Formulasi terkait dengan indikator kinerja Sasaran Strategis pertama yakni Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal (PMA dan PMDN) diperoleh dari memperbandingkan Realisasi Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun n dengan Target Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun n seperti di bawah ini:

$$\begin{aligned}
 & \text{Capaian Kinerja Total Nilai Realisasi Penanaman Modal} \\
 = & \frac{\text{Realisasi Nilai Realisasi Investasi tahun n}}{\text{Target Nilai Realisasi Investasi tahun n}} \times 100\% \\
 = & \frac{19.060.792.622.673,-}{10.700.000.000.000,-} \times 100\% \\
 = & \mathbf{178,14\%}
 \end{aligned}$$

Sumber : DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat

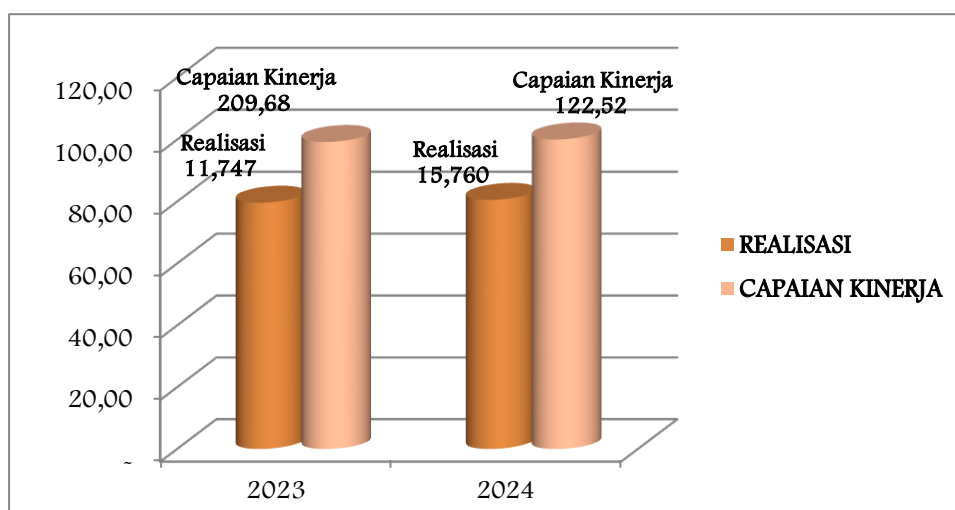
Dari tabel 3.5 di atas terlihat bahwa realisasi indikator kinerja Nilai Realisasi Penanaman Modal melebihi dari target yang ditetapkan dengan hasil dengan hasil capaian kinerja **sangat tinggi** sebesar **178,14%**, dimana Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN diharapkan meningkat setiap tahunnya.

Untuk tahun 2025, Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN secara total ditargetkan sebesar **Rp. 10.700.000.000.000,-** (sepuluh trilyun tujuh ratus milyar rupiah) dan dapat terealisasi sebesar **Rp. 19.060.792.622.673,00,-** (sembilan belas trilyun enam puluh milyar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Secara nilai, Nilai realisasi Penanaman Modal tahun 2025 sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan indikator Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN mengalami kenaikan sebesar **Rp. 3.300.227.928.193,-** dibandingkan tahun 2024 dimana nilai realisasi investasi PMA dan PMDN sebesar **Rp. 15.760.564.694.480,-**.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian sementara tahun ini (belum termasuk realisasi investasi UMK Semester II) sebesar **199,43 %** menurun dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebesar **160,15%,-** Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024-2025 dapat dilihat grafik 3.4 berikut :

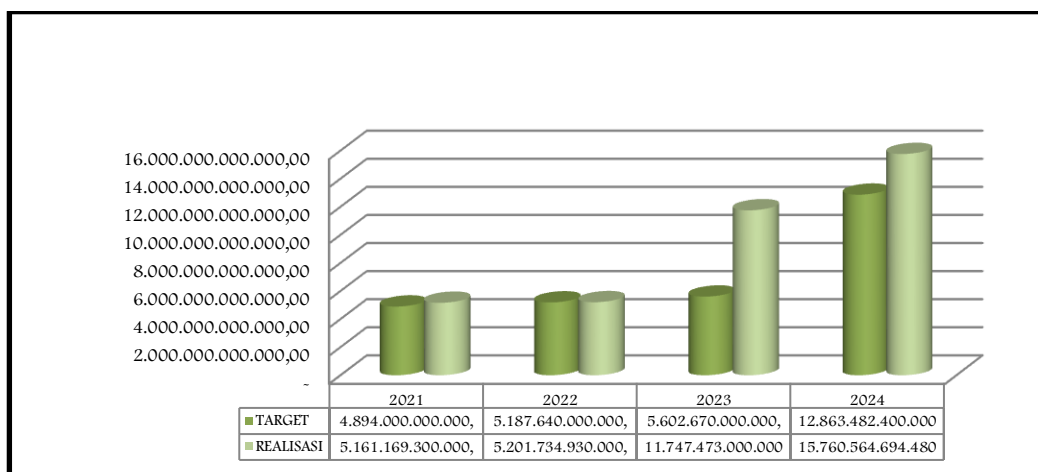
Grafik 3.4
Perbandingan Realisasi dan Capaian
Tahun 2024-2025



Sumber : Olahan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025

Sedangkan Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dari Sasaran 1 Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, sebagai berikut :

Grafik 3.5
Perbandingan Target, Realisasi
Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat
Tahun 2021 – 2025



Sumber : DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat

Nilai realisasi investasi ini terdiri dari PMA dan nilai realisasi investasi PMDN, dimana masing – masing pencapaian kerjanya selama tahun 2025, sebagai berikut:

Realisasi Investasi PMA dari yang ditargetkan sebesar **US\$ 121.540 ribu** dapat direalisasikan sebesar **US\$ 128.525,34 ribu** atau sebesar **105,75%** dengan tingkat capaian kinerja **Sangat Tinggi**. Formulasi terkait dengan indikator kinerja Realisasi Investasi PMA di Sumatera Barat diperoleh dari membandingkan Realisasi Nilai Realisasi Investasi PMA tahun n dengan Target Nilai Realisasi Investasi PMA tahun n, seperti di bawah ini:

Capaian Kinerja Total Nilai Realisasi Investasi PMA

$$= \frac{\text{Realisasi Nilai Realisasi Investasi PMA tahun n}}{\text{Target Nilai Realisasi Investasi PMA tahun n}} \times 100\%$$

$$= \frac{128.525,34}{121.540,00} \times 100\%$$

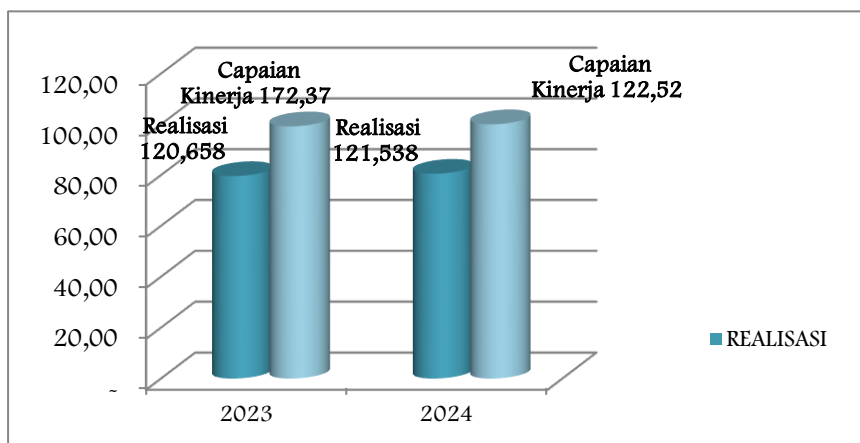
$$= 105,75\%$$

Penetapan target kinerja indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan indikator Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN, yang terdiri dari Nilai Realisasi PMA berdasarkan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2025.

Secara nilai, Nilai Realisasi Investasi PMA tahun 2025 dari sasaran strategis Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat, sebesar **US\$. 128,525,34 ribu** mengalami kenaikan sebesar **US\$. 6.986,91 ribu** dibandingkan tahun 2024, dimana nilai realisasi investasi PMA sebesar **US\$. 121.538,43 ribu** dan capaian kerjanya sebesar **105,75%**

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, realisasi investasi PMA tahun 2025 menurun sebesar **20,45%** dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebelumnya sebesar **172,37**. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023-2025 dapat dilihat grafik 3.6 berikut :

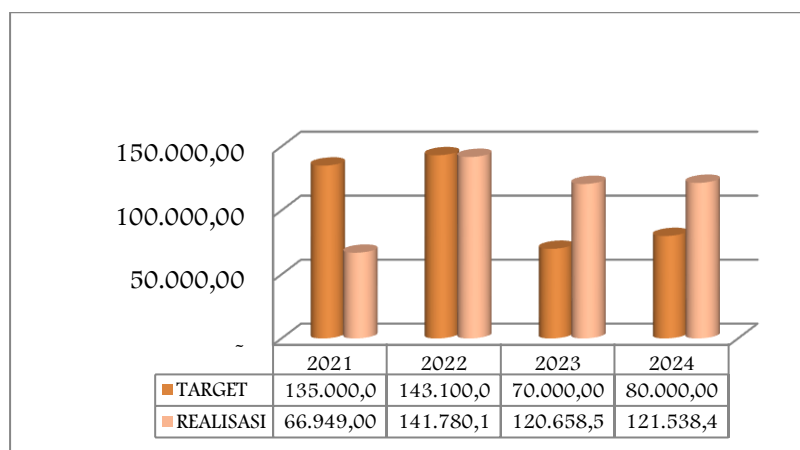
Grafik 3.6
Perbandingan Realisasi dan Capaian
Tahun 2023 -2025



Sumber : Olahan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025

Sedangkan Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dari Sasaran 1 Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, sebagai berikut :

Grafik 3.7
Perbandingan Target, Realisasi
Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat
Realisasi Investasi PMA
Tahun 2021 – 2024



Sumber : Olahan DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan Realisasi Investasi PMDN dari yang ditargetkan sebesar **Rp. 9.949.824.000.000,-** dapat direalisasikan pada tahun 2025 sebesar **Rp. 17.004.387.202.261,-** atau sebesar **170,90%** dengan tingkat capaian kinerja **sangat tinggi**. Formulasi terkait dengan indikator kinerja Realisasi Investasi PMA di Sumatera Barat diperoleh dari membandingkan Realisasi Nilai Realisasi Investasi PMDN tahun n dengan Target Nilai Realisasi Investasi PMDN tahun n, seperti di bawah ini:

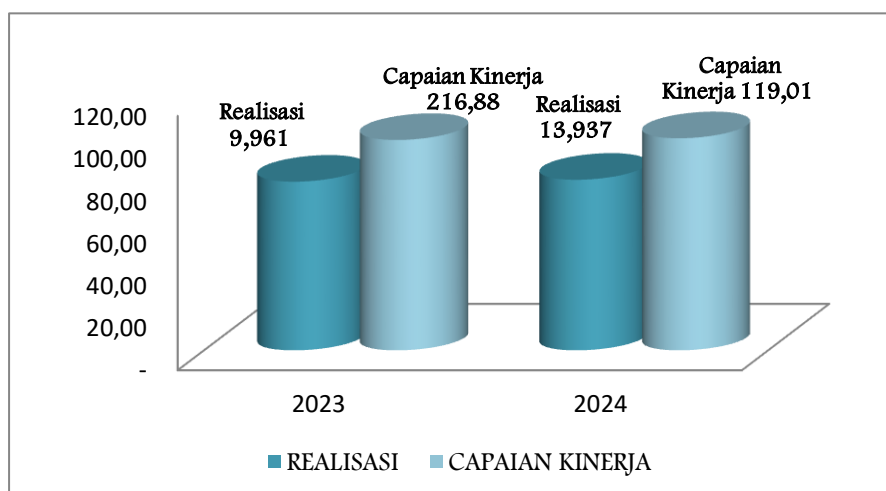
Capaian Kinerja Total Nilai Realisasi Investasi PMDN		
=	$\frac{\text{Realisasi Nilai Realisasi Investasi PMDN tahun n}}{\text{Target Nilai Realisasi Investasi PMDN tahun n}}$	X 100%
=	$\frac{17.004.387.202.261,-}{9.949.824.000.000,-}$	X 100%
= 170,90%		

Penetapan target kinerja indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan indikator Nilai Realisasi Investasi PMDN, berdasarkan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2025.

Secara nilai, Nilai realisasi investasi PMDN tahun 2025 dari sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat, dimana realisasi investasi PMDN sebesar **Rp. 13.937.488.244.480,-** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 3.975.711.044.480,-** dibandingkan tahun 2024, dimana nilai realisasi investasi PMDN sebesar **Rp.13.937.488.244.480,-** dan capaian kinerjanya sebesar **170,90%**

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 meningkat sebesar **51,89%** dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 sebelumnya yakni sebesar **170,90%**. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023-2025 dapat dilihat grafik 3.8 berikut :

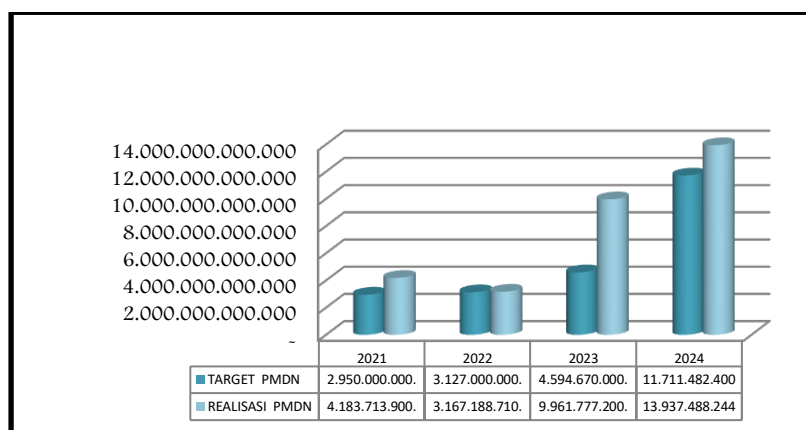
Grafik 3.8
Perbandingan Realisasi dan Capaian
Tahun 2023 -2024



Sumber : Olahan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025

Sedangkan Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dari Sasaran 1 Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, sebagai berikut :

Grafik 3.9
Perbandingan Target, Realisasi
Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat
Realisasi Investasi PMDN
Tahun 2021 – 2025



Sumber : Olahan DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat

Perbandingan Realisasi Tujuan dengan Target Rencana Strategis. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, Sasaran Strategis Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan indikator kinerja Nilai realisasi PMA dan PMDN. Untuk tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sebagaimana tergambar pada tabel 3.7 dan terlihat dalam grafik 3.6 berikut ini :

Tabel 3.7
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Kinerja
RPJMD/Renstra OPD 2021 - 2026
Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA	CAPAIAN s.d Tahun 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA (%)
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Penanaman modal PMA (ribu US\$) PMDN (juta Rp.) TOTAL (juta Rp.)	121.540,00 9.949.824.000.000,00 10.700.000.000.000,00	128.525,34 17.004.387.202.261,00 19.060.792.622.673,00	105,75% 170,90% 178,14%		
Rata – Rata Capaian Kinerja				178,14%		

Sumber : Olahan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Terdapatnya perbedaan target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dikarenakan ada penyesuaian target kinerja dengan melihat realisasi investasi tahun 2023 dan memperhatikan realisasi investasi PMA dan PMDN, namun secara total tidak merubah target pertumbuhan investasi yang menjadi target kepala daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025 – 2029.

Perbandingan Realisasi Investasi dengan Nasional dan Regional. Melihat perkembangan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN, baik itu secara regional dan nasional posisi Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025 masih berada di posisi terendah dalam realisasi investasi baik itu PMA maupun PMDN.

Peringkat Realisasi Investasi PMDN dan Provinsi Sumatera Barat secara Nasional berdasarkan lokasi, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025, berada diperingkat ke **17** dari 38 Provinsi, dengan realisasi Investasi PMDN murni sebesar **Rp.14,7 Trilyun dan ditambah dengan realisasi investasi UMK sebesar Rp. (belum didapatkan angka semester II)**. Peringkat ini dibandingkan dengan realisasi investasi PMDN tahun 2024 naik 6 tingkat (peringkat 23), secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Peringkat Realisasi Investasi PMDN Provinsi Sumatera Barat
Secara Nasional
Tahun 2021 – 2025

N O	URAIAN	PERINGKAT TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	NASIONAL	22	24	28	23	17

Sumber : Olahan Rumpun Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan untuk Realisasi Investasi PMA peringkat Provinsi Sumatera Barat secara Nasional berdasarkan lokasi, Provinsi Sumatera Barat berada diperingkat ke **26** dengan realisasi Investasi sebesar **US\$. 128,5 (juta)**, peringkat ini dibandingkan dengan realisasi investasi PMA tahun 2024 turun1 peringkat (peringkat 26), secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Peringkat Realisasi Investasi PMA Provinsi Sumatera Barat
Secara Nasional
Tahun 2021 – 2025

N O	URAIAN	PERINGKAT TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	NASIONAL	27	23	26	25	26

Sumber : Olahan Rumpum Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan secara Regional Sumatera Peringkat Realisasi Investasi PMDN Provinsi Sumatera Barat , Provinsi Sumatera Barat berada di peringkat **ke 6** dengan realisasi Investasi sebesar **Rp. 14,7 Trilyun** dan ditambah dengan realisasi investasi UMK sebesar (**belum didapatkan realisasi UMK semester II**) naik peringkat ini dibandingkan dengan realisasi investasi PMDN tahun 2024, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
Peringkat Realisasi Investasi PMDN Provinsi Sumatera Barat
Secara Regional
Tahun 2021 – 2025

N O	URAIAN	PERINGKAT TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	REGIONAL SUMATERA	9	10	10	9	6

Sumber : Olahan Rumpum Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan secara Regional Sumatera Peringkat Realisasi Investasi PMA Provinsi Sumatera Barat se-Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada di peringkat **ke 7**, dengan realisasi Investasi sebesar **US\$. 128,54(juta)**, turun 1 peringkat dibandingkan dengan realisasi investasi PMA tahun 2024 (peringkat 7), secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11
Peringkat Realisasi Investasi PMA Provinsi Sumatera Barat
Secara Regional
Tahun 2021 – 2025

N O	URAIAN	PERINGKAT TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	REGIONAL SUMATERA	7	9	7	6	7

Sumber : Olahan Rumpun Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dengan indikator kinerja Peningkatan Realisasi Investasi di Provinsi serta sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera dengan indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pengawasan/inspeksi lapangan ke lokasi proyek untuk memastikan kondisi rill dan laporan yang diberikan oleh pelaku usaha, telah dilakukan ke lokasi proyek sebanyak 110 lokasi proyek ;
2. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi yang terjadi pada 12 kegiatan usaha;
3. Menyusun peluang investasi di Sumatera Barat dalam berbagai sektor;
4. Menyusun rancangan peraturan daerah tentang kemudahan berusaha;
5. Melaksanakan sosialisasi terkait regulasi kemudahan berusaha, penyelesaian masalah kepada para pelaku usaha dengan jumlah peserta 1760 peserta serta pengisian laporan kemajuan penanaman modal (LKPM).

6. Memfasilitasi kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha mikro dan kecil.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan kinerja Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dengan indikator kinerja Peningkatan Realisasi Investasi di Provinsi serta sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera dengan indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN selama tahun 2025, juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran kinerja ini, diantaranya :

1. Belum adanya Dukungan pemerintah kab/kota untuk memberikan kemudahan berusaha dalam bentuk revisi RTRW dan RDTR nya;
2. Belum tersedianya kebijakan strategis yang mendorong calon investor untuk berinvestasi di Sumatera Barat;
3. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum mengerti tentang operasional OSS RBA dan LKPM;
4. Belum clear and cleannya tanah lokasi untuk berinvestasi, disebabkan di Sumatera Barat pada umumnya tanah ulayat;
5. Faktor kondisi alam, kondisi sosial dan kelembagaan wilayah potensi dan peluang investasi yang belum mendukung lokasi tersebut untuk kegiatan penanaman modal ke depannya;
6. Dukungan infrastruktur ke lokasi yang masih belum memadai serta aksesibilitas yang sulit dijangkau;

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten.

Kondisi Ideal	Kondisi Saat	Tindak Lanjut
Sebanyak 48 ASN SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat diharapkan bisa memahami terkait Tugas Pokok dan Fungsi Dinas serta Target Tujuan dan Sasaran yang akan di capai.	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang ada, 4 orang Yang terdiri dari : 1 orang FPKPM ahli Madya dan 3 orang FPKPM Ahli Muda. Calon Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang telah diusulkan Penyesuaian Jabatan 9 orang 	Melibatkan semua SDM dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Target Kinerja Tujuan dan Sasaran yang akan di capai serta penyusunan Anjab dan ABK

2. Sarana dan Prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian target kinerja belum cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN, terealisasi pada tahun 2025 sebesar Rp. 15.760.564.694.480,- dari target Rp. 12.863.482.400.000,- dengan tingkat capaian sebesar 122,52%.

Didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui Program – Program yang ada di Urusan Penanaman Modal sebesar Rp 2.253.395.938,- dan telah terealisasi sampai akhir tahun 2025 sebesar Rp 2.213.197.456,- atau sebesar 98,22%. Anggaran ini tersebar pada 3 (tiga) Program Urusan Penanaman Modal, yaitu yaitu (1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp.

588.991.507,- yang terdiri atas 2 kegiatan dengan 5 sub kegiatan, dan (2) Program Promosi Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp 229.436.531,- yang terdiri atas 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan, (3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 1.434.967.900,- yang terdiri atas 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat, adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp. 2.253.395.938,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 122,52%

RA = Realisasi Anggaran = Rp. 2.213.197.456,-

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{(\text{Rp. } 2.253.395.938,- \times 122,52\%) - \text{Rp. } 2.213.197.456,-}{(\text{Rp. } 2.253.395.938,-)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{\text{Rp. } 2.760.860.703,24 - \text{Rp. } 2.213.197.456,-}{(\text{Rp. } 2.253.395.938,-)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi Kinerja} = 24,30\%$$

Maka nilai efisiensi penggunaan anggaran untuk pencapaian target sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat, adalah merupakan (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%) dimana Nilai Efisiensi diperoleh dengan formula :

$$NE = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20 * 50)$$

$$NE = 50\% + (0/20) * 50$$

Dari hasil perhitungan Tingkat Efisiensi diatas, untuk mengetahui berapa nilai efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk sasaran “Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat” perlu dilakukan konversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja} / 20) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (24,30\% / 20) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 110,76\% \text{ dibulatkan } 100\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi dan sudah dikonversikan dengan skala 0% - 100% diperoleh nilai efisiensinya sebesar 110,76%, dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sampai akhir tahun 2025 tingkat efisiensinya sebesar 100 % dalam menggunakan anggaran sebesar Rp. 2.253.395.938,- yang terealisasi sebesar Rp. 2.213.197.456,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dengan capaian indikator kinerja baru sebesar 122,52 % pada tahun 2025 atau sebesar Rp. 15.760.564.694.480,-

Disamping uraian diatas, langkah – langkah kongkrit yang sudah dilaksanakan dalam rangka efisiensi sumber daya adalah :

1. Efisiensi dalam penggunaan Alat tulis kantor.
2. Efisiensi dalam melaksanakan Perjalanan dinas yang lebih selektif.
3. Membatasi belanja – belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, study banding.

Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi di Sumatera Barat pada tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12
Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pada Sasaran Strategis
Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	100%	100%	588,991,507	572,576,071	97.21%
				Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	19,227,225	19,124,375	99.47%
				Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Berusaha Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	19,227,225	19,124,375	99.47%

				Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase ketersediaan arah kebijakan umum penanaman modal dan peta potensi investasi yang lengkap	100%	100%	569,764,282	553,451,696	97,14%
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	79,149,398	78,926,846	99,72%
				Sub Kegiatan Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	19 Kab/kota	19 Kab/kota	3,849,200	3,849,200	100,00%
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 dokumen	8 dokumen	134,398,000	134,358,400	99,97%
				Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	2 dokumen	2 dokumen	352,367,684	336,317,250	95,44%
			Program Promosi Penanaman Modal	-	Jumlah Pernyataan Minat	5 dokumen	10 dokumen	229,436,531	226,982,950	98,93%
				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pernyataan Minat	5 dokumen	10 dokumen	229,436,531	226,982,950	98,93%

				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	182,947,404	182,030,650	99,50%
				Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	46,489,127	44,952,300	96,69%
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	~	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	12,8 T	15,7 T	1,434,967,900	1,413,638,435	98,51%
				Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	12,8 T	15,7 T	1,434,967,900	1,413,638,435	98,51%
				Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	124 Kegiatan usaha	126 Kegiatan usaha	527,942,400	511,416,535	96,87%

				Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	17 kegiatan usaha	22 kegiatan usaha	215,563,200	215,192,700	99,83%
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1370 Pelaku usaha	1540 Pelaku usaha	691,462,300	687,029,200	99,36%
TOTAL ANGGARAN								2.253.395.938	2.213.197.456	98,22%

Sumber : Olahan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Strategis 2.**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025. Capaian kinerja sasaran strategis “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu “ dilihat berdasarkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan capaian kinerja indikator kinerja tersebut, seperti tergambar dalam tabel 3.5 berikut ini

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,48 / 3,81	97,625/ 3,91	101,19% / 102,62 %
Rata – Rata Kinerja Sasaran Startegis 2				101,19 %

Sumber : DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat

Formulasi terkait dengan indikator kinerja Sasaran Strategis kedua yakni Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperoleh dari memperbandingkan Realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun n dengan Target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun n, seperti di bawah ini:

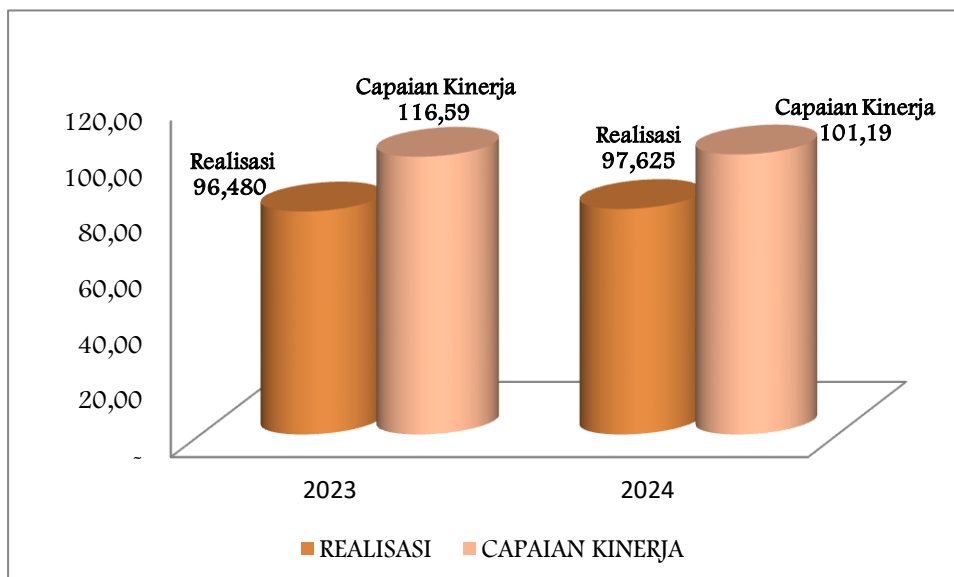
$$\begin{aligned}
 & \text{Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)} \\
 = & \frac{\text{Realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun n}}{\text{Target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun n}} \times 100\% \\
 = & \frac{97,625}{96,48} \times 100\% \\
 = & 101,19\%
 \end{aligned}$$

Sumber : DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel 3.8 di atas terlihat bahwa realisasi indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melebihi dari target yang ditetapkan dengan hasil dengan hasil capaian kinerja **Sangat Tinggi** sebesar **101,19%**, dimana Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diharapkan meningkat setiap tahunnya. Untuk tahun 2025, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan dengan nilai sebesar **96,48** dan dapat terealisasi sampai dengan kondisi triwulan 3 dengan nilai sebesar **97,625**.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun ini mengalami peningkatan dengan nilai sebesar **1,145**, dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dengan nilai sebesar **96,48**. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023-2025 dapat dilihat grafik 3.10 berikut :

Grafik 3.10
Perbandingan Realisasi dan Capaian
Tahun 2023 -2025

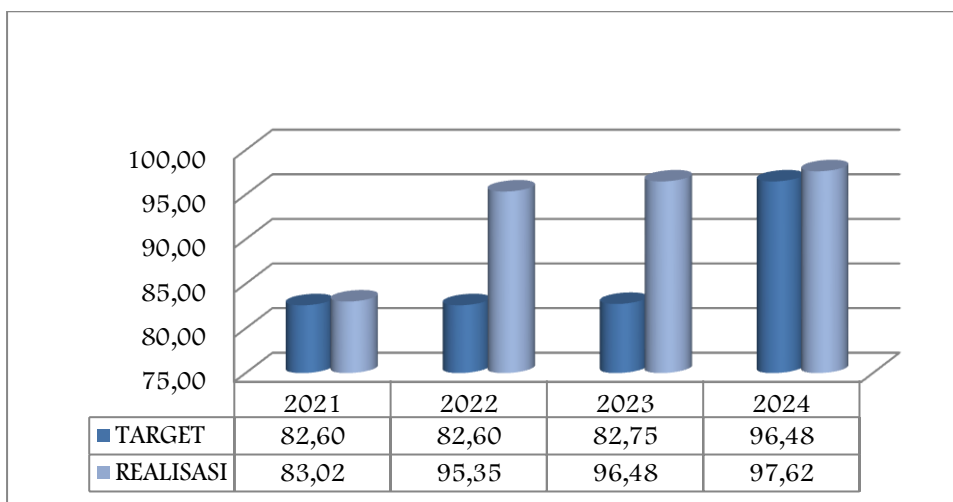


Sumber : Olahan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025

Sedangkan Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, sebagai berikut :

Grafik 3.11
Perbandingan Target, Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2021 – 2025



Sumber : DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Penetapan target kinerja indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), berdasarkan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2025.

Perbandingan realisasi tujuan dengan Rencana Strategis. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, Sasaran Strategis Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM). Untuk tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sebagaimana tergambar pada tabel 3.14 dan terlihat dalam grafik 3.9 berikut ini :

Tabel 3.14
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Kinerja
RPJMD/Renstra OPD 2021 - 2026
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA	CAPAIAN s.d Tahun 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA (%)
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,48 / 3,81	97,625 / 3,91	101,19% / 102,625%	83,20 / 3,47	117,34% / 112,68 %
Rata – Rata Capaian Kinerja				101,19%		

Sumber : Olahan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Terdapatnya perbedaan target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat karena ada penyesuaian target kinerja melihat capaian realisasi tahun 2025 dan, namun tidak merubah target pertumbuhan investasi yang menjadi target kepala daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026.

Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah penilaian yang dilakukan oleh pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan.

Terkait dengan capaian kinerja ini untuk pembandingan baik secara

nasional/Regional dan daerah, tidak ada data pembandingnya dikarenakan indikator yang digunakan berbeda atau tidak ada data pembandingnya.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi serta sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terhadap pelaku usaha dan OPD teknis terkait dengan kebijakan Perizinan dan Kemudahan Berusaha sekaligus penerbitan NIBnya, untuk tahun 2025 sesuai dengan alokasi anggaran telah dilakukan kepada 1.760 pelaku usaha Usaha Mikro Kecil;
2. Melaksanakan Pelayanan Langsung terhadap pelaku usaha yang terkendala dalam hal mengoperasikan system (aplikasi OSS) di Kantor / Front Office;
3. Terinformasikan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang informatif bagi para pelaku usaha baik secara langsung maupun lewat website DPMPTSP;

Hambatan dan kendala Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terkait penerbitan disebabkan oleh:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat, Khususnya Nelayan tentang Pengisian Format Responden serta Berubahnya Sistem dari Manual ke Online;

2. Masih terdapat gangguan atau kendala jaringan atau pengembangan aplikasi perizinan OSS oleh Pemerintah Pusat;
3. Masih rendahnya kemampuan aparatur penyelenggara terhadap penggunaan Teknologi Informasi (Layanan secara elektronik);
4. Terbatasnya jumlah aparatur penyelenggara perizinan;
5. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan;
6. Keterbatasan pelaku usaha atas perizinan secara online melalui OSS dan aplikasi perizinan berbasis web dan mengubah pola pikir masyarakat atas layanan secara tatap muka;
7. Sistem Perizinan Online Single Submission (OSS) masih belum sempurna dalam pengembangan sehingga terdapat kendala dalam pelaksanaan perizinan di daerah.

Untuk meningkatkan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu”, upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat tentang aturan – aturan yang selalu Berubah dengan Mengadakan Layanan Langsung kepada Pelaku Usaha;
2. Memberikan sosialisasi dan pendampingan terhadap penggunaan aplikasi perizinan SIP Sakato dan OSS bagi masyarakat, pelaku usaha dan SKPD Teknis Terkait;
3. Meningkatkan kualitas layanan melalui pelayanan langsung kepada masyarakat;
4. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Kementerian / Lembaga terkait;
5. Meningkatkan koordinasi yang baik dengan SKPD melalui Tim Teknis atau penyelenggara perizinan Provinsi Sumatera Barat;
6. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi perizinan SIP Sakato terhadap perizinan yang tidak diatur pada OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten.

Kondisi Ideal	Kondisi Saat	Tindak Lanjut
Sebanyak 48 ASN SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat diharapkan bisa memahami terkait Tugas Pokok dan Fungsi Dinas serta Target Tujuan dan Sasaran yang akan di capai.	1. Jumlah Fungsional Penata Perizinan yang ada 10 orang, terdiri dari FPP Ahli Madya 3 orang, FPP Ahli Muda 4 Orang dan FPP Ahli Pertama 3 orang.	Melibatkan semua SDM dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Target Kinerja Tujuan dan Sasaran yang akan di capai serta penyusunan Anjab dan ABK

2. Sarana dan prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian target kinerja belum cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), terealisasi pada tahun 2025 dengan nilai sebesar 97,625 dengan tingkat capaian sebesar 101,19%%.

Didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui Program - Program yang ada di Urusan Penanaman Modal sebesar

Rp.1.166.829.476,- dan telah terealisasi sampai akhir tahun 2025 sebesar Rp. 1.153.250.500,- atau sebesar 98,84%. Anggaran ini tersebar pada 2 (dua) Program Urusan Penanaman Modal, yaitu yaitu (1) Program Pelayanan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 1.129.881.914,- yang terdiri atas 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan, dan (2) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp.36,947,562,- yang terdiri atas 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat, adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp. 1.166.829.476,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 101,19%

RA = Realisasi Anggaran = Rp. 1.152.250.500,-

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{(\text{Rp. 1.166.829.476,-} \times 101,19\%) - \text{Rp. 1.152.250.500,-}}{(\text{Rp. 1.166.829.476,-})} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{\text{Rp. 1.130.119.746,76} - \text{Rp. 1.152.250.500,-}}{(\text{Rp. 1.166.829.476,-})} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi Kinerja} = 0,02$$

Maka nilai efisiensi penggunaan anggaran untuk pencapaian target sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah merupakan (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%) dimana Nilai Efisiensi diperoleh dengan formula :

$$NE = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja} / 20 * 50)$$

$$NE = 50\% + (0/20) * 50$$

Dari hasil perhitungan Tingkat Efisiensi diatas, untuk mengetahui berapa nilai efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk sasaran “Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat” perlu dilakukan konversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja} / 20) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (0,02 / 20) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 56,10\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi dan sudah dikonversikan dengan skala 0% - 100% diperoleh nilai efisiensinya sebesar 56,10%, dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sampai akhir tahun 2025 tingkat efisiensinya sebesar 56,10% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.166.829.476,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.152.250.500,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,19 % pada tahun 2025 atau sebesar 97,625

Disamping uraian diatas, langkah – langkah kongkrit yang sudah dilaksanakan dalam rangka efesiensi sumber daya adalah :

1. Efesiensi dalam penggunaan Alat tulis kantor.
2. Efesiensi dalam melaksanakan Perjalanan dinas yang lebih selektif.
3. Membatasi belanja – belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, study banding.

Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi di Sumatera Barat pada tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.15
Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pada Sasaran Strategis
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pelayanan Penanaman Modal	-	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	96,48% / 3,81 86,36%	97,625% / 3,91 88 %	1,129,881,914	1,116,361,500	98,80%
				Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 4. Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	96,48% / 3,81 86,36%	97,625% / 3,91 88 %	1,129,881,914	1,116,361,500	98,80%
				Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis	5 Pelaku usaha	5 Pelaku Usaha	192,066,626	190,908,850	99,40%

					Risiko Terintegrasi secara Elektronik					
				Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000 Izin/ non izin	964 Izin/ non izin	692,058,488	681,664,740	98,50%
				Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3 kegiatan usaha	3 kegiatan usaha	245,756,800	243,787,910	99,20%
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	-	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Dalam Pelaksanaan Berbasis Teknologi Informasi	60%	60%	36,947,562	36,889,000	99,84%

				Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	60%	60%	36,947,562	36,889,000	99,84%
				Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	1 dokumen	36,947,562	36,889,000	99,84%

**Sasaran
Strategis 3****Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025. Pengukuran pencapaian sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dilakukan melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD. Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/116/LHE/INSP/2025 tanggal 12 Agustus 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai akuntabilitas kinerja **81,52%** dengan kategori **A** dari target sebesar **80,69%** atau dengan capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar **101,03%**. Nilai ini menunjukkan bahwa AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja handal.

Tabel 3.17
Target dan Realisasi Kinerja
Tujuan Meningkatkan Organisasi yang Akuntabel dan Melayani
Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Tahun 2025

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	80,69% / A	81,52 % / A	101,03%
Rata – Rata Capaian Kinerja					101,03%

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja DPM & PTSP Tahun 2025

Formulasi terkait dengan capaian indikator kinerja tujuan kedua yakni Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja diperoleh dari Realisasi Nilai Evaluasi

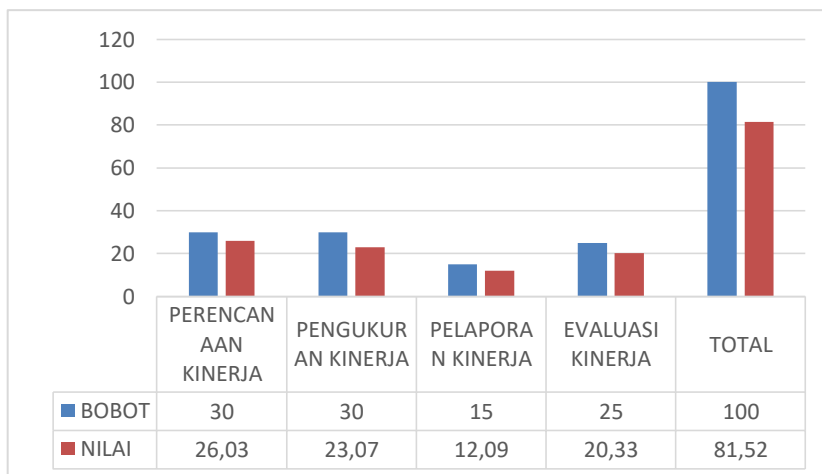
Akuntabilitas tahun ndibagi dengan Target Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun n , seperti di bawah ini:

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	
=	$\frac{\text{Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun n}}{\text{Target Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun n}} \times 100\%$
=	$\frac{80,69}{81,52} \times 100\%$
=	101,03%

Sumber : Olahan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Nilai Akuntabilitas Kinerja diukur dengan formula penghitungan penjumlahan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja yaitu Nilai Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inpektorat Provinsi SumateraBarat terhadap 4 (empat) komponen tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai tertinggi pada komponen Perencanaan Kinerja dengan nilai 26,09% dari bobot 30% dan komponen terendah adalah Pelaporan Kinerja dengan nilai 12,09% dari bobot 15%. Berikut rincian komponen nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun penilaian 2025:

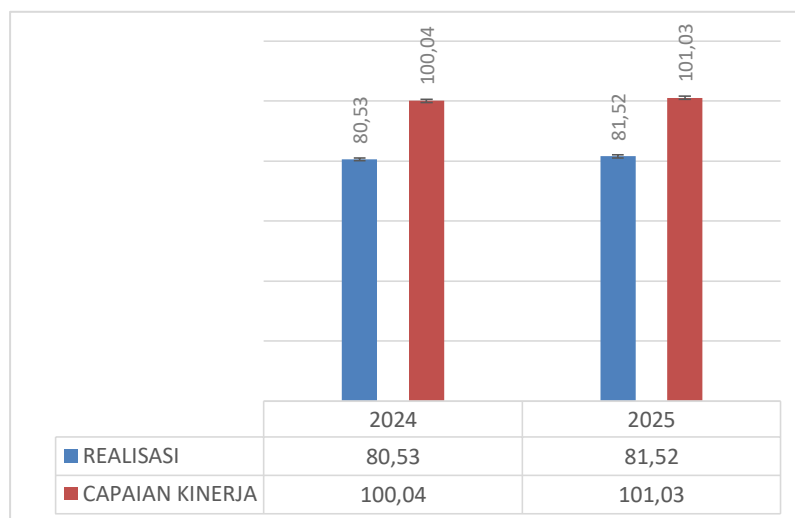
Grafik 3.12
Capaian Tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Per Komponen Tahun 2025



Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 ini meningkat dari nilai 80,53 menjadi 81,25 atau meningkat 0,72 point. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024-2025 dapat dilihat grafik 3.13 berikut :

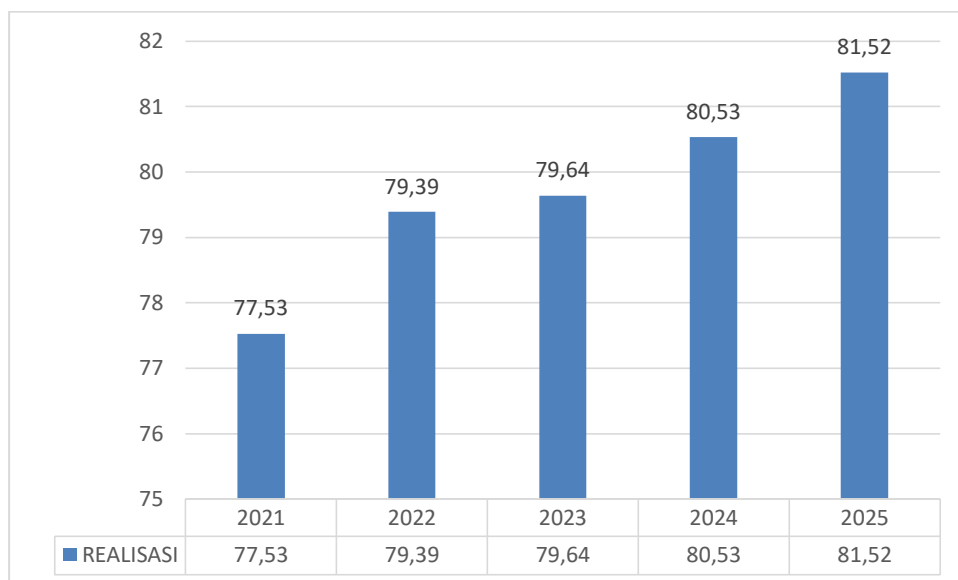
Grafik 3.13
Perbandingan Realisasi dan Capaian
Tahun 2024 ~2025



Sumber : Olahan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025

Sedangkan Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi dari Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, sebagai berikut :

Grafik 3.14
Realisasi Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Selama Tahun 2021 s.d Tahun 2025



Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP DPM & PTSP oleh Inspektorat, diolah

Meskipun secara keseluruhan nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat meningkat dari tahun ke tahun, namun jika dilihat dari seluruh komponen, terjadi penurunan nilai dari komponen Pelaporan Kinerja yaitu dari 13,48 pada tahun 2021 menjadi 11,84 pada tahun 2025 dimana turun sebesar 1,64 point. Dalam hal ini, untuk pelaporan kinerja tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan catatan rekomendasi hasil evaluasi oleh Inspektorat.

Berikut secara detail dapat dilihat perbandingan nilai hasil evaluasi per komponen tahun 2021-2025, sebagaimana tampak pada tabel 3.18 berikut ini:

Tabel 3.18
Nilai Komponen Akuntabilitas Kinerja
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2025

NO	ASPEK KOMPONEN PENILAIAN	NILAI				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	
1.	Perencanaan Kinerja	25,77	25,68	26,42	26,49	26,03
2.	Pengukuran Kinerja	20,45	21,15	21,08	22,07	23,07
3.	Pelaporan Kinerja	13,48	13,56	11,64	11,84	12,09
4.	Evaluasi Internal	8,00	7,96	20,50	20,13	20,33
5.	Pencapaian Kinerja	9,83	11,04	~	~	~
Nilai Hasil Evaluasi		77,53	79,39	79,64	80,53	81,52
Kategori		BB	BB	BB	A	A

Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP DPM & PTSP oleh Inspektorat, diolah

Perbandingan Realisasi dengan Dokumen Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, bahwa Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi melalui indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

Tabel 3.19
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra
Tahun 2025-2029

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA	CAPAIAN s.d Tahun 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA (%)
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	80,69	81,52	101,03%	81,25	
Rata – Rata Capaian Kinerja				101,03%		

Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP DPM & PTSP oleh Inspektorat, diolah

Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2025 mendukung capaian target pada Renstra/RPJMD sebesar 101,03%. Sedangkan hingga akhir capaian RPJMD/Renstra Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD baru mencapai 99,64%. Hal ini berarti bahwa masih dibutuhkan upaya-upaya serta komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi oleh seluruh ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk bisa mencapai target akhir RPJMD/Renstra terhadap indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Perbandingan Realisasi Sakip OPD dengan Sakip Provinsi. Sesuai dengan hasil evaluasi Sakip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, hasil yang dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 80,53 (A) diatas nilai sakip Provinsi Sumatera Barat yang baru berada diangka 78,98 (BB).

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah dilakukan. Dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Organisasi, terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2025, diantaranya :

1. Perencanaan Kinerja.
 - a. Penetapan SK Tim Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk mengkoordinir peningkatan akuntabilitas kinerja secara berjenjang dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Melakukan dialog kinerja agar masing-masing individu memiliki kontribusi yang terukur dalam pencapaian kinerja organisasi;
 - c. Menyusun SKP dan Rencana Aksi individu yang mencantumkan target kinerja secara periodik untuk mengawal pencapaian kinerja;
 - d. Melakukan penyempurnaan cascading kinerja secara berjenjang untuk memudahkan dalam menyusun MPH setiap individu;
 - e. Melakukan evaluasi terhadap Rencana Aksi dan tindak lanjut Rencana Aksi;
 - f. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.

2. Pengukuran Kinerja.

Sudah Memanfaatkan e-sakip untuk pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.

3. Pelaporan Kinerja.

- a. Sudah Memutakhirkan Pelaporan Kinerja sesuai hasil rekomendasi SAKIP dengan menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja serta membandingkan dengan hasil realisasi sebelumnya dan

membandingkan dengan realisasi nasional untuk semua indikator kinerja sasaran;

- b. Pada pelaporan kinerja telah disajikan perhitungan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam bentuk data rill dengan menggunakan perhitungan tingkat efisiensi sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

- a. Melaksanakan Rapat Evaluasi Progress Kerja Tim Akuntabilitas Kinerja pada masing-masing bidang.
- b. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang meliputi Realisasi Rencana Aksi, Capaian Sasaran Renstra, Capaian Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Realisasi Fisik dan Keuangan secara berkala setiap awal bulan.
- c. Memanfaatkan e-sakip untuk penginputan hasil evaluasi capaian kinerja.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025, juga terdapat beberapa **faktor yang menghambat** tercapainya sasaran kinerja ini, diantaranya :

1. Dialog kinerja belum maksimal disebabkan adanya perubahan regulasi.
2. Belum optimalnya implementasi SPIP secara menyeluruh di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, maka dalam menyusun konsep Perencanaan dan Penganggaran internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sering diabaikan resiko dari penempatan penggunaan anggaran yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2025, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif upaya tindak lanjut, diantaranya :

1. Melakukan dialog kinerja secara berjenjang disertai dengan perbaikan terhadap pohon kinerja dan cascading kinerja;
2. Memastikan Komitmen bersama melakukan perbaikan penerapan akuntabilitas kinerja diseluruh jajaran mulai dari Eselon 2 hingga Staf;
3. Mendorong semua ASN secara bersama - sama dengan Sekretariat menyusun rencana aksi;
4. Membuat fokus substansi kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan Rencana Kerja dan memberikan penganggaran sesuai dengan prioritas;
5. Meningkatkan kualitas kinerja ASN sampai ke level individu;
6. Rapat pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala setiap bulan /triwulan yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
7. Mengendalikan dan mengevaluasi implementasi peta proses bisnis secara berkala;
8. Menyepakati jadwal rapat antar pimpinan, agar Rapat pengendalian dan evaluasi kinerja dihadiri oleh semua pihak;
9. Memaksimalkan peran agen perubahan sebagai penggerak perubahan dengan melakukan monitoring evaluasi atas pelaksanaan rencana kerjanya;
10. Memastikan segala kebijakan terkait penerapan Reformasi Birokrasi dapat terimplementasi sampai ke level individu.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan

Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten.

Kondisi Ideal	Kondisi Saat	Tindak Lanjut
Sebanyak 48 ASN SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat diharapkan bisa memahami dan menguasai SAKIP	Sistem AKIP baru dipahami secara maksimal pada level Struktural, Fungsional Perencana dari total ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat	Melibatkan semua tim SAKIP pada seluruh unit kerja dimasing-masing bidang untuk bisa memahami SAKIP dan mengimplementasikannya dalam menjalankan tupoksi sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat

2. Sarana dan prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian target kinerja belum cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD yang terealisasi pada tahun 2025 sebesar 80,69% dari target 81,52% dengan tingkat capaian sebesar 101,03%, didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp.11.659.029.345,- dan telah terealisasi sampai akhir tahun 2025 sebesar Rp. 11.285.343.824,- atau sebesar 96,79%. Anggaran ini tersebar pada 2 (dua) kegiatan utama dengan 5 sub kegiatan utama yaitu:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 3 sub kegiatan yaitu: (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan 3) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 3 sub kegiatan yaitu:(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; (2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD; dan (3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp.11.659.029.345,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 101,03%

RA = Realisasi Anggaran = Rp. 11.285.343.824,-

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{(\text{Rp. 11.659.029.345,-} \times 101,03\%) - \text{Rp. 11.285.343.824}}{(\text{Rp. 11.659.029.345,-})} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{\text{Rp. 11.779.117.347,25} - \text{Rp. 11.285.343.824,-}}{\text{Rp. 11.659.029.345}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi Kinerja} = 4,24\%$$

Dari hasil perhitungan Tingkat Efisiensi diatas, untuk mengetahui berapa nilai efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” perlu dilakukan konversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja} / 20) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (4,24 / 20) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 11,1\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 11,1% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp.11.659.029.345,- yang terealisasi sebesar Rp. 11.285.343.824,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,03% atau dengan nilai sebesar 81,52. Keberhasilannya capaian kinerja tersebut didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta berkat dukungan 5 (lima) sub kegiatan utama yang ke 5 (lima) targetnya terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan dapat terealisasi 100%.

Disamping uraian diatas, langkah – langkah kongkrit yang sudah dilaksanakan dalam rangka efisiensi sumber daya adalah :

4. Efisiensi dalam penggunaan Alat tulis kantor.
5. Efisiensi dalam melaksanakan Perjalanan dinas yang lebih selektif.
6. Membatasi belanja – belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, study banding.

Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan utama dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, sebagaimana terlihat pada tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.20
Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pada Sasaran Strategis
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi AKuntabilitas Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100%	11.659.029.345	11.285.343.824	96,79
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	85%	85%	16.715.000	15.079.000	90,21
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	1.525.000	1.512.000	99,15
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	7 laporan	7 laporan	3.660.000	3.657.000	99,92

					Realisasi Kinerja SKPD					
				Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara	11.530.000	9.910.000	85,95
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	8.307.941.033	8.096.317.652	97,45
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang	48 orang	8.141.515.133	7.937.513.652	97,49
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	164.595.900	156.980.000	95,37
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulana, Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD	13 laporan	13 laporan	1.830.000	1.824.000	99,67

				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	6.670.000	6.661.250	99,87
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	6.670.000	6.661.250	99,87
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	8.446.000	6.050.000	71,63
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 orang	12 orang	8.446.000	6.050.000	71,63
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.610.932.061	1.527.392.782	94,81
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 paket	17 paket	18.002.400	17.980.700	99,88
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	18.730.000	9.768.000	52,15
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 paket	32 paket	116.775.000	113.233.990	96,97
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5 paket	66.004.000	65.901.890	99,85

				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	6 dokumen	6 dokumen	1.995.000	1.920.000	96,24
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 laporan	81 laporan	1.389.425.661	1.318.588.202	94,90
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100%	100%	14,030,000	12,304,350	87,70
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	1 unit	1 unit	14.030.000	12.304.350	87,70
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.014.407.000	966.348.688	95,26%
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	167.520.000	128.110.139	76,47
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.170.211.751	1.141.448.158	97,54

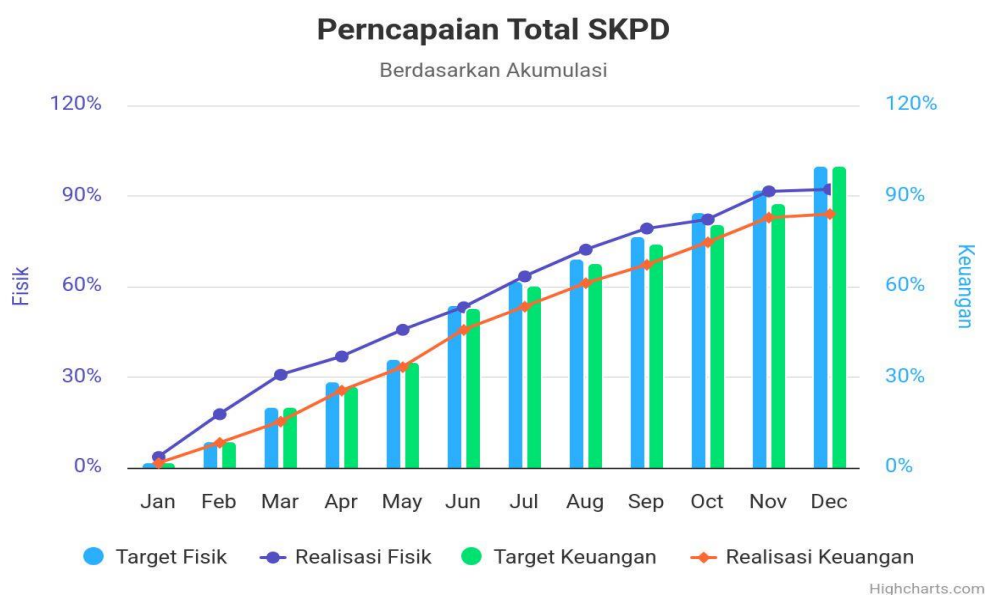
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	100%	356.563.500	351.980.493	98,71
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	11 unit	190.710.000	186.576.246	97,83
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	22 unit	22 unit	11.000.000	9.900.000	90,00%
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 unit	46 unit	3.125.000	3.120.000	99,84
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	126,168,500	126,082,747	99.93

Sumber : Olahan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

3.4. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Pada Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mendapat anggaran melalui Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 12.265.211.251,- Anggaran tersebut tersebar di 6 program, 13 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Hingga akhir Tahun 2025, dari pagu sebesar Rp. 12.265.211.251,- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.11.841.944.495,- atau sebesar 96,55%. Adapun perkembangan realisasi setiap bulannya dibanding dengan target penyerapan dapat dilihat pada grafik 3.15 berikut

Grafik 3.15.
Perkembangan realisasi setiap bulannya dibanding dengan Target Penyerapan



Sumber : <https://simbangda.sumbarprov.go.id/dashboard>

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa secara umum capaian realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 belum mencapai target

penyerapan setiap bulannya. Terlihat adanya gap antara target dan realisasi disetiap bulannya, hingga pada akhir 2025 gap tersebut semakin kecil yaitu sebesar sebesar (-) 6,83%. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing PPTK di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya berkomitmen untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan rencana aksi anggaran yang dibuat. Untuk memperbaiki keadaan ini, sangat dibutuhkan komitmen pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan hingga mampu melakukan penyerapan anggaran dengan optimal mendekati target yang direncanakan.

Realisasi Anggaran Per Program yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja. Salah satu indikator dalam mengukur efektivitas capaian program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas fungsinya yaitu dengan melihat ketercapaian indikator kinerja dengan dukungan anggaran pada masing-masing program. Secara rinci, pagu alokasi setiap program dan ketercapaian penyerapan pada setiap programnya terhadap indikator kinerja sasaran strategis di tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 3.21

Tabel 3.21
Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA		PAGU	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN *)	10.700.000.000.000	19.060.794.811.741	178,13%	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	44.327.600	38.211.400	96,79%
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	89.729.450	59.158.795	65,92%
						PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	174.572.000	171.427.340	98,20%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,48 / 3,81	98 / 3,92	101,58% / 102,89%	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	287.978.356	278.397.136	96,67%
						PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEMINFORMASI PENANAMAN MODAL	9.574.500	9.416.000	98,34
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	80,69 / A	81,52 / A	101,03%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.659.029.345	11.285.343.824	98,34%
TOTAL PAGU							12.265.211.251	11.841.944.495	96,55%

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, data diolah

*) Nilai Realisasi Investasi s.d TW IV, belum termasuk realisasi UMK Semester II

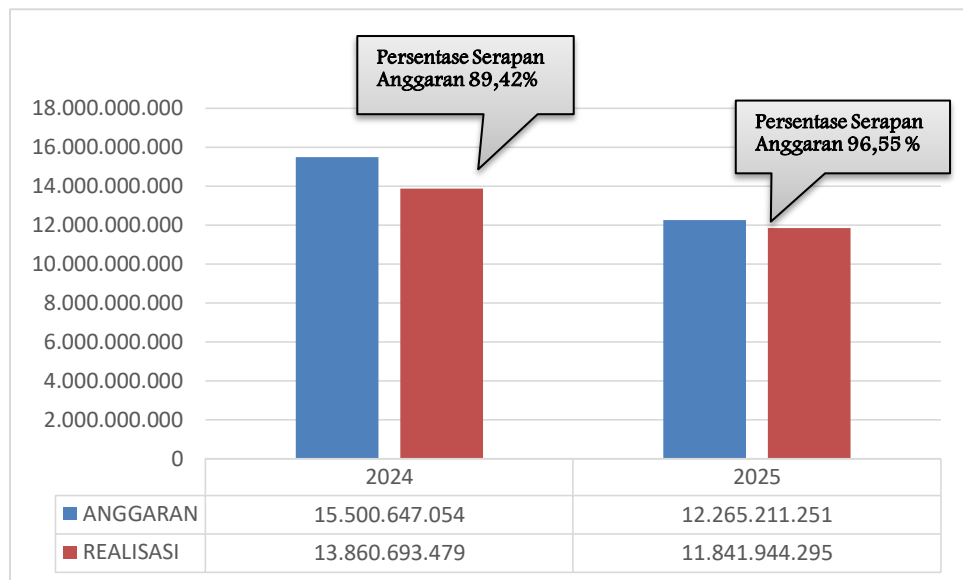
Berdasarkan tabel 3.21 di atas, diketahui bahwa :

1. Dengan penggunaan anggaran sampai akhir tahun 2025 sebesar 96,55% yang tersebar di 6 program dapat tercapai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 126,86%. Hal ini bisa diartikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pendukungnya telah berhasil maksimal dalam pencapaian target 3 (tiga) sasaran kinerja yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yaitu sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi dengan indikator kinerja Nilai Realisasi Penanaman Modal, sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
2. Pada tahun 2025, serapan anggaran terbesar ada pada Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan serapan sebesar 98,34%, kemudian diikuti oleh Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan serapan anggaran sebesar 98,20%, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan serapan anggaran baru sebesar sebesar 96,79%, Program Pelayanan Penanaman Modal dengan serapan anggaran sebesar 96,67%, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan serapan anggaran 86,20% dan terakhir Program Promosi Penanaman Modal dengan serapan anggaran sebesar 65,92%.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2024, capaian realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebesar 96,55%, mengalami kenaikan sebesar 7,13%, dimana realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah sebesar 96,55% dan

ditahun 2024 hanya 89,42% sebagaimana tergambar pada grafik 3.16 berikut.

Grafik 3.16
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran
DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024 – 2025



Sumber : Hasil analisis kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian realisasi anggaran di tahun 2025, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif tindak lanjut, antara lain :

1. Membuat form pengendalian terhadap rencana aksi pada masing-masing sub kegiatan;
2. Menyusun rencana kerja tahunan dan rencana penarikan dana secara detail sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar tidak menumpuk di akhir tahun dan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah dibuat;

3. Setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adaptif terhadap kebijakan anggaran dan segera melakukan penyesuaian agar pekerjaan tidak tertunda;
4. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang meliputi Realisasi Rencana Aksi, Capaian Sasaran Renstra, Capaian Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Realisasi Fisik dan Keuangan secara berkala setiap awal bulan.

3.5. PENGHARGAAN TAHUN 2025

Selama Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, penghargaan yang di peroleh dari Pemerintah Pusat yakni dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM RI adalah :

1. Penghargaan dari Gubernur Sumatera Barat atas Pencapaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat atas Prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dengan Predikat Nilai "A".



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini merupakan laporan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Dengan kata lain, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya pemecahan masalah untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar sasaran strategis yang ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Sebagai Instansi yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berusaha menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dengan baik. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 yang secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa penyempurnaan langkah-langkah aksi pada masa yang akan datang. Dari Laporan Kinerja pada tahun 2025 ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, tahun 2025 memberikan informasi kepada *stakeholders* atas keberhasilan/kegagalan pencapaian 1 (satu) tujuan daerah yang diukur

oleh 1 (satu) indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025 – 2029.

Dari Laporan Kinerja pada tahun 2025 ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, tahun 2025, juga memberikan informasi kepada stakeholders atas keberhasilan/kegagalan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis OPD yang diukur oleh 3 (satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 serta perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2025.
2. Untuk pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dengan dua indikator kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama OPD, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 606.181.906,- atau sebesar 4,94% dari total anggaran belanja tahun 2025 sebesar Rp. 12.265.211.251,- dengan realisasi sebesar Rp 556.600.671,- atau sebesar 91,82%.
3. Tujuan Utama yang menjadi Indikator Kinerja Daerah “Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif” dengan indikator kinerja “Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi menampakkan kinerja yang sangat baik karena didukung dengan pembinaan kepada UMK. Sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebesar 10,50%, dapat direalisasikan sebesar 20,94% dengan hasil Sangat Tinggi, yang mana capaian kinerjanya mencapai 199,43%.
4. Kategori keberhasilan dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator, adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yakni “Nilai Realisasi Penanaman Modal” dimana capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan indikator tersebut direalisasikan dengan hasil Sangat Tinggi, karena capaiannya kinerjanya 199,43%.

- b. 1 (satu) Indikator Kinerja Utama “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, dimana capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator tersebut direalisasikan dengan hasil Sangat tinggi, karena capaian kinerjanya >100%, yakni sebesar 100,38%.
- c. 1 (satu) Indikator Kinerja OPD, yakni “Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dimana capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator tersebut direalisasikan dengan hasil Sangat Tinggi, karena capainnya kinerjanya 100,03% dengan hasil A (81,52) dari target direncanakan A (80,69).

4.2. LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.

Sistem Akuntailitas Kinerja Instansi Pemerintah dirancang untuk pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan mengimplementasikan SAKIP diharapkan akan mendorong pelaksanaan *Money Follows Target*. Artinya alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembagunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP sehingga kinerja yang ditargetkan dapat dicapai dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai *stakeholders*. Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, antara lain:

1. Merumuskan arah Investasi;
2. Membuat turunan dari peraturan yang ada;
3. Melaksanakan Sosialisasi dalam hal Penyelenggaraan Kemudahan Perizinan Berusaha terhadap OPD dan Pelaku Usaha;

4. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terhadap OPD teknis dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perizinan dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan teknis terhadap Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelaporan kegiatan Penanaman Modal;
6. Melakukan Pengawasan dan Inspeksi / Pengawasan Ke lapangan / perusahaan dalam hal meneliti kelengkapan persyaratan perizinan dan pelaporan kegiatan Penanaman Modal;
7. Menyiapkan Kebijakan Strategis yang mendorong calon investor untuk berinvestasi di Sumatera Barat;
8. Membuat Pemetaan terhadap Target Investasi
9. Melakukan Rekonsiliasi Data Potensi dan Peluang Investasi setiap periodik bersama stakeholder terkait;
10. Tetap melakukan pengembangan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
11. Meningkatkan komitmen dan pemahaman pimpinan dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menerapkan SAKIP;
12. Memanfaatkan Cascading Kinerja yang telah dirumuskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penganggaran.

Padang, Januari 2025

Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat



Drs. LUHUR BUDIANDA SY, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197010061989081001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Setia Budi No.15.Padang,Kota Padang, Sumatera Barat
Telp.0751-811341, 811343 Fax.0751-811342 <http://dpmpstps.sumbarprov.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. LUHUR BUDIANDA SY, M.Si
Jabatan : Kepala DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat


Selanjutnya disebut pihak pertama

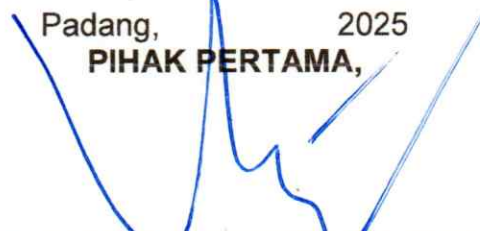
Nama : MAHYELDI
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

MAHYELDI

Padang, 2025
PIHAK PERTAMA,

Drs. LUHUR BUDIANDA SY, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197010061989081001

PERJANJIAN KINERJA

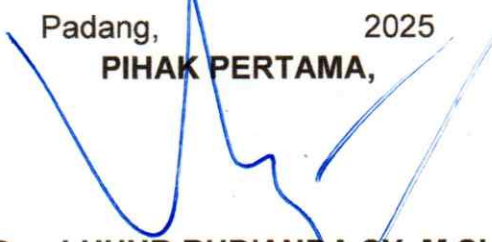
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Penanaman Modal PMA (ribu US \$) *) PMDN (Rp.) Total (Rp.) **)	121.540,00 8.949.824.000.000,00 10.700.000.000.000,00
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,63 / 3,91
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80,69 / A

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.659.029.345,00	APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	44.327.600,00	APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	89.729.450,00	APBD
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	287.978.356,00	APBD
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	174.572.00,00	APBD
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	9.574.500,00	APBD
TOTAL		12.265.211.251,00	APBD

PIHAK KEDUA,

MAHYELDI

Padang, 2025
PIHAK PERTAMA,

Drs. LUHUR BUDIANDA SY, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 197010061989081001